

**HUBUNGAN ANTARA UMR, PENDAPATAN PNS, BIAYA
PENDIDIKAN, IRR MAHASISWA DENGAN TINGKAT
PARTISIPASI KERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(1990-2005)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Ekonomi



OLEH:

YULIUS KRISTIANTO

031324023

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2008

**HUBUNGAN ANTARA UMR, PENDAPATAN PNS, BIAYA
PENDIDIKAN, IRR MAHASISWA DENGAN TINGKAT
PARTISIPASI KERJA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(1990- 2005)**

SKRIPSI

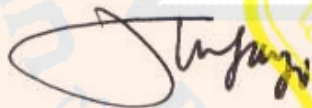
Oleh:

YULIUS KRISTIANTO

NIM: 031324023

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si

Tanggal: 22 Februari 2008

Dosen Pembimbing II



Indra Darmawan, SE., M.Si

Tanggal: 3 Maret 2008

SKRIPSI

**HUBUNGAN ANTARA UMR, PENDAPATAN PNS, BIAYA PENDIDIKAN,
IRR MAHASISWA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI KERJA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (1990 – 2005)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh;

Yulius Kristianto

NIM: 031324023

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

pada tanggal 14 Maret 2008

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si

Sekretaris Y. M. Vianey Mudayen, S.Pd

Anggota Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si

Anggota Indra Darmawan, S.E., M.Si

Anggota Y. M. Vianey Mudayen, S.Pd

Tanda Tangan

Yogyakarta, 14 Maret 2008

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma



Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku mempersembahkan skripsi ini kepada:
Kedua orang tuaku, Bapak Y. Kadarusman dan Ibu
Th. Ismulyani
Adikku Maria Kristianingrum
Simbah Hartowiyono
Adik kecilku Glori Enjel

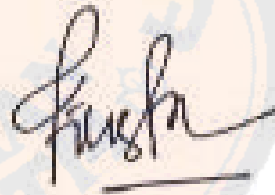
Blessed the peacemakers;
For they shall be called the children of God
(Matthew 5: 9)

Pernyataan Keaslian Karya

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah

Yogyakarta, 14 Maret 2008

Penulis,



Yulius Kristianto

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : YULIUS KRISTIANTO

Nomor mahasiswa : 031324023

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :
HUBUNGAN ANTARA UMR, PENDAPATAN PNS, BIAYA PENDIDIKAN, IRR MAHASISWA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI KERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (1990 – 2005)

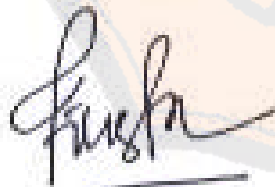
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Dengan demikian pernyataan ini yang saya buat sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 14 Maret 2008

Yang menyatakan



(YULIUS KRISTIANTO)

ABSTRAK

**HUBUNGAN ANTARA UMR, PENDAPATAN PNS, BIAYA PENDIDIKAN,
IRR MAHASISWA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI KERJA DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1990- 2005**

**Yulius Kristianto
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2008**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara UMR, Pendapatan PNS, Biaya pendidikan dan IRR mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1990- 2005

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari data-data sekunder yang berasal dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah korelasi *Product Moment*.

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara UMR dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1990- 2005.
2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1990- 2005.
3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Biaya pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1990- 2005.
4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara IRR mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1990- 2005.

ABSTRACT

THE CORRELATION BETWEEN MINIMUM REGIONAL WAGES, SALARY OF CIVIL SERVANT, EDUCATION COST, INTERNAL RATE RETURN OF UNIVERSITY STUDENT AND LABOR FORCE PARTISIPATION RATE IN YOGYAKARTA SPECIAL REGION IN 1990- 2005

**Yulius Kristianto
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2008**

The purpose of research is to know the correlation between minimum regional wages, salary of civil servant, education cost, internal rate return of university student and labor force participation rate in Yogyakarta special region in 1990- 2005.

This is a *descriptive research*. The technique of data collection was documentation which was collected from secondary data which were based on various reliable sources. The technique of data analysis was *Product Moment Correlation*.

Based on the analysis, it can be concluded that:
There is positive and significant correlations between:

1. Minimum regional wages and labor force participation rate in Yogyakarta special region in 1990- 2005.
2. Salary of civil servant and labor force participation rate in Yogyakarta special region in 1990- 2005.
3. Education cost and labor force participation rate in Yogyakarta special region in 1990- 2005.
4. Internal rate return of university student and labor force participation rate in Yogyakarta special region in 1990- 2005

KATA PENGANTAR

Penulis Mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Hubungan antara UMR, Pendapatan PNS, Biaya Pendidikan, IRR Mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (1990- 2005) “.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan. Penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak dalam menyusun skripsi ini, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph.D selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Bapak Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si selaku Kepala Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
3. Bapak Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si Selaku Kepala Program Studi Pendidikan Ekonomi dan selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran dan ketelitian membimbing penulis selama penyusunan skripsi
4. Bapak Indra Darmawan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang penuh perhatian dan ketekunan membimbing penulis dalam menyusun skripsi
5. Bapak Yohanes Maria Vianey Mudayen, S.Pd selaku Dosen Tamu
6. Ibu Dra.C. Wigati R.A, M.Si, Bapak Drs. P.A Rubiyanto segenap dosen PE dan PAK terima kasih atas bantuannya

7. Mbak Titin di sekretariat PE, pak Wawiek dan mbak Aris di sekretariat PAK terima kasih banyak atas bantuannya
8. Urbanus, Nining, Riska, Rini, Istadi, Adhika, Asih, Meita, Ian, Tasya, Diah, Wayah, Heri, Rino dan seluruh teman-teman Pendidikan Ekonomi 2003 Terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini.
9. Harjanto, Irwan PE 2002, Christo, Jojo, Prayit, sugeng terima kasih atas saran dan dorongan semangatnya.
10. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu kelancaran penyusunan skripsi

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan membantu pembaca

Yogyakarta, 14 Maret 2008

Yulius Kristianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DATAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Dinamika Perkembangan Penduduk dan Ketenagakerjaan Nasional	6
B. Dinamika Ketenagakerjaan di Propinsi D.I Yogyakarta	17
C. Faktor- faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Kerja	20
D. Penelitian Terdahulu	38
E. Kerangka Berpikir	31
F. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber data	35
C. Variabel Penelitian	35
D. Definisi Operasional	36

E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM	41
A. Keadaan Geografis Propinsi D. I Yogyakarta	41
B. Sejarah Propinsi D.I Yogyakarta	42
C. Penduduk dan ketenagakerjaan di Propinsi D.I Yogyakarta	46
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	50
A. Analisis Data	50
1. Uji Normalitas	50
2. Uji Hipotesis	52
a. Uji Hipotesis Pertama	53
b. Uji Hipotesis Kedua	54
c. Uji Hipotesis Ketiga	54
d. Uji Hipotesis Keempat	54
B. Pembahasan	55
1. Hipotesis Pertama	55
2. Hipotesis Kedua	58
3. Hipotesis Ketiga	60
4. Hipotesis Keempat	63
BAB VI KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
C. Keterbatasan	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Propinsi Tahun 2000- 2025	9
Tabel 2.2 Penduduk Usia Kerja menurut Golongan Umur Tahun 1990- 2003	11
Tabel 2.3 Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas menurut kegiatan di Propinsi DIY Tahun 2004- 2005	18
Tabel 2.4 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang berkerja selama seminggu Yang lalu menurut Lapangan Usaha Utama Di Propinsi DIY Tahun 2005	19
Tabel 2.5 Upah Minimum Propinsi	21
Tabel 2.6 Daftar Gaji dan Golongan/ Ruang serta Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977	25
Tabel 3.1 Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi	40
Tabel 4.1 Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/ Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta	47
Tabel 4.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang berkerja selama seminggu Yang lalu menurut Lapangan Usaha Utama Di Propinsi DIY Tahun 2005.....	48
Tabel 4.3 Lokasi Industri di Propinsi D.I. Yogyakarta	49
Tabel 5.1 Uji Normalitas	50
Tabel 5.2 Uji Korelasi <i>Product Moment</i> dari Pearson	53
Tabel 5.3 Tabel UMR dan Tingkat Partisipasi Kerja di Propinsi D.I Yogyakarta Tahun 1990 – 2005	56
Tabel 5.4 Tabel Pendapatan PNS dan Tingkat Partisipasi Kerja di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005	58
Tabel 5.5 Perkembangan biaya pendidikan dan TPK di Propinsi D.I Yogyakarta Tahun 1990 – 2005	61

Tabel 5.6 Perkembangan IRR Mahasiswa dan TPK di Propinsi D.I Yogyakarta
Tahun 1990 – 2005 63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja merupakan modal penggerak pembangunan di suatu negara. Penyediaan tenaga kerja yang banyak secara otomatis akan menggerakkan sektor-sektor perekonomian. Penyediaan tenaga kerja yang besar hendaknya diimbangi oleh penyediaan lapangan kerja yang besar pula. Harapannya, Penyediaan lapangan kerja dapat meningkatkan partisipasi kerja yang nantinya akan memacu pertumbuhan pendapatan nasional suatu negara. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara global pada tahun 2006 ditandai dengan banyaknya jumlah pekerja. Peningkatan PDB ini akan mengarah pada stabilisasi pasar tenaga kerja di dunia dengan cara membuka lapangan kerja (www.apindo.or.id). Seperti halnya Amerika Serikat, pada tahun 2006 mencoba menyediakan lapangan kerja yang layak dan produktif. Usaha tersebut untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi negara dan membantu para pekerja keluar dari kemiskinan.

Usaha penyediaan lapangan kerja oleh negara-negara maju dilakukan karena pada sepuluh tahun terakhir terjadi penurunan dalam populasi usia kerja (usia 15 tahun ke atas). Rasionya sebesar 61,4% pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 1,2% dari sepuluh tahun. Penurunan tersebut banyak terjadi pada kalangan kaum muda yaitu usia 15 sampai 24 tahun. Rasio pada kaum muda menurun dari 51% di tahun 1996 menjadi 46,8%. Penurunan rasio pada kaum muda dikarenakan mereka banyak memilih bersekolah dari pada bekerja.

Mengenai tingkat partisipasi kerja untuk kaum dewasa yang bekerja khususnya wanita sebesar 48,9% pada tahun 2006. Angka tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 1996 yaitu sebesar 49,6%. Tingkat partisipasi kerja kaum laki-laki yang bekerja mengalami penurunan dari 75,7% pada tahun 1996 menjadi 74% pada tahun 2006.

Selain itu, Rasio lapangan kerja di Negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Pasifik juga mengalami penurunan dari 67,5% pada tahun 1996 menjadi 66,1% pada tahun 2006. Penurunan tersebut dapat dikaitkan dengan belum stabilnya keadaan ekonomi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik karena terkena imbas krisis ekonomi tahun 1997- 1998 lalu. Imbas krisis ekonomi tersebut juga terjadi di Indonesia. Krisis ekonomi menyebabkan perekonomian tidak stabil yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kerugian dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Keadaan perekonomian Indonesia yang belum stabil berlangsung sampai sekarang. Kenyataannya pada tahun 2005, mengungkapkan bahwa keadaan ekonomi yang belum stabil mendorong peningkatan Tingkat partisipasi kerja secara nasional. Peningkatan TPAK terjadi pada bulan februari sebesar 0,48%. TPAK tersebut mengalami perubahan dari 67,54% pada tahun 2004 menjadi 68,02% pada tahun 2005 (www.bkkbn.go.id)

Perubahan tingkat partisipasi kerja tergantung pada tenaga kerja yang tersedia. Tenaga kerja terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Seperti halnya wilayah di Indonesia yang kepulauan memiliki tingkat partisipasi kerja antar daerah yang berbeda pula. Selama bulan Agustus 2004 sampai dengan Februari 2005 terdapat beberapa

Propinsi yang mengalami peningkatan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yang sangat besar, antara lain terdapat tiga propinsi masing-masing sebagai berikut : NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) 6,18 persen, Kalimantan Timur 3,72 persen, dan Sumatera Utara 3,38 persen. Sedangkan Propinsi yang memiliki TPAK terendah adalah Maluku yaitu sebesar 59,22% , dan TPAK tertinggi secara nasional adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 79, 45%.

Sedangkan TPAK di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 69,8% pada tahun 2005. TPAK pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 1,9% dari 71,7 % pada tahun 2004 (www.bkkbn.go.id). Penurunan TPAK tersebut termasuk kecil karena TPAK pada tahun 2003 sebesar 70,3%. Apabila TPAK Propinsi DIY dibandingkan dengan TPAK di Maluku maka hasilnya menunjukkan TPAK propinsi DIY lebih besar dari TPAK di Maluku. Hal tersebut berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja di daerah masing-masing yang berbeda-beda. Lapangan kerja di Propinsi DIY meliputi sektor pertanian, perdagangan, industri kecil dan sektor jasa. Ketiga sektor tersebut masih mendominasi lapangan kerja di propinsi DIY. Persentase pembagian lapangan kerja meliputi pertanian 41%, perdagangan 21%, sektor industri 18%, sektor jasa dan yang lain 14%.

Selain penyediaan lapangan kerja, perlu dilihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Kerja di DIY. Alasannya, apakah faktor lain tersebut yang menyebabkan TPAK di DIY lebih besar dari pada TPAK di Maluku. Faktor-faktor tersebut meliputi besarnya upah minimum Regional, besarnya pendapatan, banyaknya tingkat lulusan pendidikan dan biaya

pendidikan. Faktor tersebut perlu dipertimbangkan karena tingkat UMR di setiap daerah yang pasti akan berbeda. Sehingga dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi kerja di suatu propinsi dapat dilihat tinggi atau rendah Tingkat Partisipasi kerjanya. Selain itu dengan TPAK di setiap daerah yang tinggi diharapkan dapat membantu menggerakkan pembangunan melalui sektor-sektor ekonomi yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti tentang “HUBUNGAN ANTARA UMR, PENDAPATAN PNS, BIAYA PENDIDIKAN, IRR MAHASISWA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI KERJA DI YOGYAKARTA (1990-2005)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara Upah Minimum Regional dengan tingkat partisipasi kerja di DIY (1990-2005)?
2. Bagaimana hubungan antara pendapatan PNS dengan tingkat partisipasi kerja di DIY (1990-2005)?
3. Bagaimana hubungan antara biaya pendidikan dengan tingkat partisipasi kerja di DIY (1990-2005)?
4. Bagaimana hubungan antara IRR mahasiswa dengan tingkat partisipasi kerja di DIY (1990-2005)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan UMR terhadap dengan partisipasi kerja di propinsi DIY
2. Untuk mengetahui hubungan Pendapatan PNS dengan tingkat partisipasi kerja di propinsi DIY
3. Untuk mengetahui hubungan biaya pendidikan dengan tingkat partisipasi kerja di propinsi DIY
4. Untuk mengetahui hubungan IRR mahasiswa dengan tingkat partisipasi kerja di propinsi DIY

D. Manfaat Penelitian

1. Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menambah informasi dan pengambilan kebijakan berkaitan dengan tingkat upah minimum regional

2. Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah konteks wacana yang lebih luas dan pengetahuan bidang lainnya mahasiswa Universitas Sanata Dharma.

3. Peneliti berikutnya

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti lainnya, terutama yang berminat pada masalah yang sama yang berhubungan dengan penelitian.

4. Peneliti

Dengan penelitian ini penulis memperoleh tambahan Pengalaman, pengetahuan, dan wawasan dalam upaya mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh dari perkuliahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dinamika Perkembangan Penduduk dan Ketenagakerjaan Nasional

1. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Angka Jumlah penduduk Indonesia dapat dijumpai pada hasil Sensus Penduduk terbitan Biro Pusat Statistik (www.tempointeraktif.com). Pelaksanaan sensus penduduk dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Di Indonesia pelaksanaan sensus penduduk telah dilaksanakan sensus penduduk sebanyak tujuh kali. Pada masa sebelum kemerdekaan dilakukan dua kali sensus yaitu pada tahun 1920 dan 1930 (Razake, 1988:26). Sedangkan setelah kemerdekaan dilakukan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan tahun 2000. Tujuan dilaksanakannya sensus penduduk adalah untuk mengetahui jumlah penduduk yang menetap di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Jumlah penduduk tahun 2000 sebesar 205,1 juta merupakan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan SP 2000 mengalami banyak sekali hambatan terutama berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi sebagian wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Pelaksanaan lapangan wilayah kerusuhan tersebut tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Dengan demikian, untuk wilayah-wilayah tersebut jumlah

penduduknya harus diestimasi. Sementara itu, data penduduk tahun 2004 dan 2005 adalah angka estimasi berdasarkan proyeksi penduduk 2000-2005 (www.bkkbn.go.id).

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebesar 205,1 juta jiwa. Sehingga dapat diketahui laju pertumbuhan penduduk. Dari data menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 1980 mengalami penurunan cukup cepat. Pada periode 1990-2000 terjadi penurunan sebesar 1,97 persen, kemudian pada periode 2000-2005 mengalami penurunan sebesar 1,34 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi tertentu mengalami penurunan selama dua periode 1990-2000 dan 2000-2005. Propinsi yang tidak mengalami penurunan yaitu Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Laju pertumbuhan penduduk terakait dengan penambahan jumlah penduduk di suatu negara. Laju pertumbuhan penduduk disebabkan adanya revolusi demografi (Prawiro, 1979:20). Bentuk perubahan revolusi demografi ini adalah perubahan kebudayaan, seperti perubahan teknologi, revolusi industrialisasi, revolusi pertanian. Perubahan kebudayaan tersebut menyebabkan perubahan demografi di suatu wilayah sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk yang banyak.

Berdasarkan teori pertumbuhan penduduk terdapat 3 evolusi yaitu: 1) tingkat pertumbuhan evolusi tinggi (*high potensial growth*). Pada tahap ini, kebudayaan masih agraris yang terbelakang dan pengaruh tradisi masih kuat.

Pertumbuhan penduduk dilihat dari tingkat kelahiran yang tinggi sebanding dengan tingkat kematian. Kelahiran yang tinggi disebabkan oleh banyaknya perkawinan usia muda, sedangkan kematian disebabkan karena penyakit yang tidak dapat diobati karena pengobatan belum maju dan juga akibat kekurangan pangan. 2) tingkat pertumbuhan berubah (*transitional*). Tahap ini ditandai dengan adanya perekonomian mengarah industrialisasi dan tata kehidupan kota. Kelahiran secara natural masih tinggi sedangkan kematian tidak banyak. secara lambat laun pertumbuhan natural rendah dan diikuti tingkat kematian yang rendah. 3) tingkat permulaan penurunan (*Incipient decline*). Fase ini menggambarkan kelanjutan dari tahap pertumbuhan transisional. Jumlah penduduk tidak mengalami penurunan, dan setelah keseimbangan baru kemungkinan penduduk akan berkurang, tetap atau bertambah. Pertumbuhan penduduk pada fase ini sangat lambat, fase ini terjadi pada negara-negara industri maju di dunia.

Teori pertumbuhan penduduk untuk negara berkembang seperti Indonesia mengarah pada tingkat pertumbuhan berubah (*transisional*). Pada tahap perubahan transisional pertumbuhan tingkat kelahiran natural masih tinggi dan tingkat kematian sedikit. Selain itu, perubahan demografi ditandai dengan perekonomian mulai digerakkan oleh sektor industri dan tata kehidupan mengarah pada perkotaan. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia juga terpengaruh oleh perubahan demografi yang ada. Karena wilayah Indonesia berupa kepulauan menyebabkan penduduk banyak tersebar di pulau-pulau dengan 30 propinsi. Pertumbuhan penduduk di pulau

yang satu dengan yang lain berbeda karena disebabkan perubahan kebudayaan dan perubahan demografi. Laju pertumbuhan penduduk dapat diprediksikan setiap lima tahunan. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia berdasarkan provinsi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2025

PROVINSI	2000	2005	2010	2015	2020	2025
1. Nanggro Aceh D	3,929.3	4,037.9	4,112.2	4,166.3	4,196.5	4,196.3
2. Sumatra Utara	11,642.6	12,452.8	13,217.6	13,923.6	14,549.6	15,059.3
3. Sumatra Barat	4,248.5	4,402.1	4,535.3	4,693.4	4,785.4	4,864.0
4. Riau	4,948.0	6,108.4	7,469.4	8,997.7	10,692.8	12,571.3
5. Jambi	2,407.2	2,657.3	2,911.7	3,164.8	3,409.0	3,636.8
6. Sumatra Selatan	6,210.8	6,755.9	7,306.3	7,840.1	8,369.6	8,875.8
7. Bengkulu	1,455.5	1,617.4	1,784.5	1,955.4	2,125.8	2,291.6
8. Lampung	6,730.8	7,291.3	7,843.0	8,337.4	8,881.0	9,330.0
9. Kep. Bangka	900.0	971.5	1,044.7	1,116.4	1,183.0	1,240.0
10. DKI Jakarta	8,361.0	8,699.6	8,981.2	9,168.5	9,262.6	9,259.9
11. Jawa Barat	35,724.0	39,066.7	42,555.3	46,073.8	49,512.1	52,740.8
12. Jawa Tengah	31,223.0	31,887.2	32,451.6	32,882.7	33,138.9	33,152.8
13. D.I Yogyakarta	3,121.1	3,280.2	3,439.0	3,580.3	3,694.7	3,776.5
14. Jawa Timur	34,766.0	35,550.4	36,269.5	36,840.4	37,183.0	37,194.5
15. Banten	8,098.1	9,309.0	10,661.1	12,140.0	13,717.6	15,343.5
16. Bali	3,150.0	3,378.5	3,596.7	3,792.6	3,967.7	4,122.1
17. NTB	4,008.6	4,355.5	4,701.1	5,040.8	5,367.7	5,671.6
18. NTT	3,823.1	4,127.3	4,701.1	5,040.8	5,367.7	5,671.6
19. Kalimantan Barat	4,016.2	4,394.3	4,771.5	5,142.5	5,493.6	5,809.1
20. Kalimantan Tengah	1,856.6	2,137.9	2,439.9	2,757.2	3,085.8	3,414.4
21. Kalimantan Selatan	2,984.0	3,240.1	3,503.3	3,767.8	4,023.9	4,258.0
22. Kalimantan Timur	2,451.9	2,810.9	3,191.0	3,587.9	3,995.6	4,400.4
23. Sulawesi Utara	2,000.9	2,141.9	2,277.2	2,402.8	2,517.2	2,615.5
24. Sulawesi Tengah	2,176.0	2,404.0	2,640.5	2,884.2	3,131.2	3,372.2
25. Sulawesi Selatan	8,050.8	8,493.7	8,926.6	9,339.9	9,715.1	10,023.6
26. Sulawesi Tenggara	1,820.3	2,085.9	2,363.9	2,653.0	2,949.6	3,246.5
27. Gorontalo	833.5	872.2	906.9	937.5	962.4	979.4
28. Maluku	1,166.3	1,266.2	1,369.4	1,478.3	1,589.7	1,698.8
29. Maluku Utara	815.1	890.2	969.5	1,052.7	1,135.5	1,215.2
30. Papua	2,213.8	2,518.4	2,819.9	3,119.5	3,410.8	3,682.5

(Sumber: www.datastatistik-indonesia.com)

2. Komposisi Penduduk di Indonesia

Unsur komposisi penduduk meliputi jenis kelamin, komposisi umur serta ras atau etnis (Razake, 1988:75). Yaitu: a) Komposisi Jenis Kelamin. Jenis kelamin berpengaruh langsung pada peristiwa kelahiran, kematian dan perkawinan. Komposisi jenis kelamin diungkapkan sebagai rasio jenis, yaitu jumlah laki-laki per 100 wanita. Rasio ini lazim dihitung menurut kelahiran yaitu: jumlah kelahiran bayi laki-laki dibanding dengan setiap kelahiran 100 bayi wanita. b) Komposisi Umur. Komposisi umur penduduk adalah produk dari tingkat kelahiran, kematian dan migrasi yang berlangsung melalui suatu periode tiga atau empat generasi. Untuk membandingkan komposisi umur antar bangsa menggunakan kategori usia dibawah 15 tahun, usia 15-64 tahun, usia 65 tahun ke atas.

Kondisi pemuda di Indonesia, dapat dilihat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, dapat dilihat melalui komposisi jumlah penduduk usia kerja berumur di atas 15 tahun atau tenaga kerja. Dari tahun 1999-2003, terjadi peningkatan jumlah pemuda berusia 15-24 tahun, dari sebesar 39,14 juta pada tahun 1999 menjadi sebesar 39,8 juta pada tahun 2003, atau bertambah sebanyak 655 ribu orang (www.nakertrans.go.id). Bila dilihat komposisi tenaga kerja tersebut pada tahun 2003, maka dapat dilihat dari sejumlah 152,65 juta terdapat 26,1 persen atau sebanyak 39,8 juta orang di antaranya adalah pemuda berusia 15-24 tahun. Kelompok pemuda ini merupakan tenaga kerja yang paling berpotensi. Selain itu penduduk usia kerja golongan umur 25-34 tahun dengan proporsi yang besar yaitu sebanyak

25 persen dari seluruh penduduk usia kerja. Dari keadaan ini, dapat diketahui sejumlah 51 persen dari seluruh penduduk usia kerja di Indonesia adalah golongan penduduk muda usia.

Tabel 2.2 Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur					
Tahun 1999-2003 (x 1.000 orang)					
Gol. Umur	1999	%	2003	%	1999-2003
15 - 24	39.141	28	39.796	26	655
25 - 34	33.097	23	38.187	25	5.090
35 - 44	28.815	20	31.836	21	3.022
45 - 54	19.020	13	21.107	14	2.087
55 +	21.024	15	21.721	14	697
Jumlah	141.096	100	152.647	100	11.551
Sumber : BPS, Sakernas 2003					

Unsur komposisi penduduk yang lain adalah komposisi golongan bangsa, komposisi secara ekonomi (Prawiro, 1979:53). Unsur komposisi menurut golongan bangsa memiliki pengertian tempat kelahiran, kewarganegaraan. Pengertian mengenai golongan bangsa memuat tentang masyarakat yang terkait dengan suku bangsa, daerah, agama dan daerah. Komposisi penduduk berdasarkan golongan bangsa tidak ditujukan untuk membedakan tetapi untuk melihat kebinekaan di suatu wilayah. Komposisi penduduk di Indonesia juga terdiri dari banyak suku bangsa. Karena wilayah kepulauan banyak etnis dan suku bangsa, seiring perkembangan zaman perbedaan tersebut diharapkan tidak menyebabkan perpecahan tetapi menjadi unsur penyediaan tenaga kerja secara nasional.

Komposisi penduduk secara ekonomi dilihat dari kesanggupan orang untuk bekerja atau mencari nafkah dan dilihat dari mata pencahariaannya. Pada usia akhil balik atau umur 14 tahun dianggap sudah mampu mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Pada usia muda yang sudah mau bekerja berarti akan meningkatkan tingkat partisipasi pada angkatan kerja. Sedangkan berdasarkan mata pencahariaannya dilihat dari sebelas unit produksi/ lapangan usaha, yaitu: 1) pertanian; 2) pertambangan dan penggalian; 3) industri pengolahan; 4) listrik, gas, dan air minum; 5) bangunan; 6) perdagangan; 7) pengangkutan dan komunikasi; 8) bank dan lembaga keuangan lainnya; 9) sewa rumah; 10) pemerintahan; dan 11) jasa (Dumairy, 1996:38). Perbedaan komposisi berdasarkan lapangan usaha dilihat dari karakteristik daerahnya. Untuk daerah pedesaan angkatan kerja mendominasi sektor pertanian masih sebesar 84% dikarenakan lahan pertanian yang masih luas.

Selain melihat komposisi penduduk, juga perlu dikaitkan dengan piramida penduduk. Piramida penduduk ini untuk melihat persebaran jenis kelamin dan umur di suatu negara. Dari piramida penduduk dapat diketahui beberapa karakteristik, jumlah penduduk secara keseluruhan, jumlah pria dan wanita, jumlah pria dan wanita per golongan umur, pertumbuhan penduduk. Indonesia yang merupakan negara berkembang memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat jika dilihat dalam grafik piramida beraturan. Kelompok umur (0 – 4) tahun mempunyai anggota paling banyak, dan kelompok-kelompok diatasnya makin sedikit jumlah anggotanya. Perubahan penduduk

dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan pergantian dalam jumlah besar di setiap kelompok umur. Akibatnya jumlah penduduk secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang cepat.

3. Ketenagakerjaan dan Penyediaan tenaga kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dan dalam atau akan melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (www.temppointeraktif.com). Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah golongan orang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan(Simanjuntak, 1996:3).

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Ketenagakerjaan (ILO), Angkatan kerja dibedakan lagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Penduduk yang bekerja (sering disebut pekerja), dan
2. Penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Dengan demikian angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Angka yang

sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja (www.bappenas.go.id)

Besarnya penyediaan tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang mau menawarkan jasanya untuk melaksanakan proses produksi. Penyediaan tenaga kerja tergantung pada besarnya penduduk. Ketersediaan tenaga kerja di suatu Negara memiliki hubungan dengan pertumbuhan penduduk, alasanya: (1) Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap penawaran kerja tergantung pada faktor penyebab yang melandasi pertumbuhan itu. (2) Fertilitas dan mortalitas adalah determinan penting dari penawaran tenaga kerja. (3) Peningkatan fertilitas dan penurunan mortalitas mempunyai akibat langsung terhadap penawaran tenaga kerja melalui efek tingkah laku pada tingkat partisipasi kerja (Prawiroatmojo, 1988:138).

Jumlah orang yang bekerja tergantung pada permintaan tenaga kerja di masyarakat. Tempat bertemunya permintaan dan penawaran tenaga kerja adalah pasar tenaga kerja. Kesediaan orang untuk bekerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Dalam ekonomi neoklasik diasumsikan bahwa penyediaan tenaga kerja akan bertambah apabila tingkah upah bertambah (Simanjuntak, 1996:4). Asumsinya bahwa semua pihak mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar kerja, maka teori neoklasik beranggapan bahwa jumlah penyediaan tenaga kerja selalu sama dengan permintaan. Pada kenyataannya titik ekuilibrium yang ingin dicapai karena informasi yang tidak pernah sempurna dan hambatan-hambatan institusional yang selalu ada.

4. Tingkat Partisipasi kerja (*Labour Force Partisipation Rate*)

Tingkat partisipasi kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja. TPK dinyatakan dalam seluruh penduduk dalam usia kerja dan dapat dinyatakan dalam untuk satu kelompok penduduk tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok wanita di kota, kelompok tenaga terdidik, kelompok umur (Simanjuntak, 1996:45). Dalam rumus dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga kerja}} \times 100\%$$

Penduduk dalam usia kerja tidak semua terlibat dalam pekerjaan atau mencari pekerjaan. Sebagian penduduk ada yang bersekolah, ada yang mengurus rumah tangga, atau sementara tidak bekerja dengan alasan-alasan fisik. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar TPK, semakin besar pula jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga akan berpengaruh pada tingkat partisipasi kerja yang kecil.

Dalam penyediaan tenaga kerja jangka pendek, terjadi perubahan pada partisipasi kerja yang melibatkan angkatan kerja terpusat pada kelompok tertentu di kalangan masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut meliputi sejumlah kaum wanita yang sudah menikah, mahasiswa-mahasiswa, dan

sebagian orang-orang pensiunan. Kelompok-kelompok tersebut akan meningkatkan tingkat partisipasi kerja apabila tingkat upah mengalami kenaikan dan lowongan kerja yang dibutuhkan cukup banyak. Keadaan akan berbalik, tingkat partisipasi kerja akan menurun apabila tingkat upah mengalami penurunan dan lowongan kerja yang dibutuhkan tidak banyak.

Kelompok masyarakat yang kondisi tingkat partisipasi kerjanya bersifat putus-putus disebut *pekerja sekunder* (Bellante, 1983: 93). Kelompok masyarakat dikatakan pekerja sekunder apabila hanya mengikuti kecenderungan perubahan kondisi pasar dan kenaikan upah. Sedangkan untuk kalangan masyarakat yang tingkat partisipasinya tidak mengikuti kecenderungan perubahan upah dan kondisi pasar disebut *pekerja primer*. Kalangan masyarakat yang tergolong dalam pekerja primer adalah sejumlah individu kaum laki-laki dan kaum wanita yang berperan sebagai kepala keluarga dan individu kaum laki-laki dan kaum wanita yang tergolong angkatan kerja yang mau bekerja tanpa mementingkan kondisi pasar.

Alasan setiap individu untuk memasuki angkatan kerja pada saat tingkat upah mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada tingkah laku individu tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh kenaikan upah akan membawa orang mengisi waktu luang mereka untuk bekerja yang menghasilkan upah. Kecenderungan untuk mengisi waktu luang yang menghasilkan uang membuat penyediaan tenaga kerja meningkat apabila tingkat upah dipasaran mengalami kenaikan.

Perubahan sikap individu untuk masuk angkatan kerja merupakan keputusan tingkat partisipasi kerja. Keputusan yang diambil akan menyebabkan tingkat partisipasi dilihat dari sector pasar dan kenaikan upah saja. Hal tersebut menyebabkan tingkat partisipasi kerja tidak menentu jika hanya dilihat dari pekerja sekunder dan arah siklus bisnis. Keputusan individu yang hanya melihat perubahan upah sehingga masuk dalam angkatan kerja merupakan penyediaan tenaga kerja jangka pendek saja. Sehingga untuk penyediaan tenaga kerja jangka panjang tingkat partisipasi kerja akan menurun dan dapat dikatakan pekerja sekunder sebagai cadangan tenaga kerja dalam perekonomian suatu negara.

B. Dinamika Ketenagakerjaan di D.I.Jogyakarta

Penduduk DIY mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1990 jumlah penduduk DIY sebanyak 2.912.611 Jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 3.120.478 Jiwa. Kepadatan penduduk pada Th 1990 sebesar 914 jiwa per Km² meningkat menjadi 979 jiwa per Km² sedangkan pertumbuhan penduduk th.1980-1990 sebesar 0,58 % pada tahun 1990-2000 meningkat menjadi 0,72 % dan salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk ini adalah berkaitan dengan kondisi DIY sebagai salah satu daerah yang relatif aman dan tenteram sehingga migrasi masuk lebih besar dari pada migrasi keluar (www.pemda-diy.go.id)

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 2.530.926 pada tahun 2004. Jumlah tenaga kerja tersebut terdiri dari angkatan

kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja sebesar 1.815.362 atau 71,73%. Sedangkan jumlah bukan angkatan kerja sebesar 715.564 atau 28,27%. Pada tahun 2005 jumlah Tenaga kerja meningkat karena pengangguran yang berkurang. Akibatnya, jumlah orang yang bekerja meningkat sehingga menjadi 1.757.702 pada tahun 2005 dari 1.701.802 pada tahun 2004. Data mengenai jumlah angkatan kerja di D.I Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Kegiatan di Propinsi D.I Yogyakarta 2004- 2005

Kegiatan	2004		2005	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Angkatan Kerja	1.815.362	71,73	1.851.209	71,95
1.Bekerja	1.701.802	67,24	1.757.702	68,31
2.Pengangguran	113.560	4,49	93.507	3,63
Bukan Angkatan Kerja	715.564	28,27	721.810	28,05
1.Sekolah	308.261	12,18	320.228	12,45
2.Mengurus Rumah tangga	321.589	12,70	284.470	11,06
3.Lainnya	85.714	3,39	117.112	4,55
Jumlah	2.530.926	100,00	2.573.019	100,00

(Sumber: Sakernas, BPS Propinsi D.I. Yogyakarta)

Disamping itu, Pengaruh keberhasilan KB ditandai dengan semakin menurunnya penduduk yang berusia 0-14 tahun. Sedangkan sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan penduduk adalah menurunnya angka kematian, meningkatnya usia produktif dan usia harapan hidup dan di bidang ketenagakerjaan, perkembangan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan. Dalam hal penyerapan tenaga kerja mulai menunjukkan suatu pergeseran dari sektor primer yang bersifat tradisional/ pekerjaan pertanian dari

45,98% turun menjadi 31,47%, pada sektor tersier/ lapangan pekerjaan perdagangan, keuangan dan jasa dari 34,39% naik menjadi 48,52% dan untuk sektor sekunder/ pekerjaan industri pengolahan mengalami kenaikan dari 19,63% menjadi 20,01%.

Pergeseran angkatan kerja yang berada pada sector pertanian tersebut dikarenakan banyak angkatan kerja yang terserap pada beberapa sector lain seperti sektor perdagangan, industri pengolahan, bangunan, dsb. Pergeseran angkatan kerja ini ternyata tidak berpengaruh terhadap sektor pertanian sendiri. Berdasarkan sakernas tahun 2005, penduduk yang berusia 15 tahun keatas masih banyak bekerja disektor pertanian. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut Lapangan Usaha Utama di Propinsi D.I. Jogjakarta tahun 2005

NO	Lapangan Usaha Utama	Penduduk			
		Laki- laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Pertanian	331.043	303.378	634.421	36,09
2	Industri Pengolahan	124.484	115.789	240.273	13,67
3	Bangunan	108.305	2.381	110.686	6,29
4	Perdagangan besar, Eceran, dan Rumah Makan	196.374	230.004	426.378	24,26
5	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	50.061	8.806	58.867	3,35
6	Keuangan, Asuransi, Persewaan Bangunan/ Tanah, Jasa Perusahaan	19.988	9.735	29.723	1,69
7	Jasa Kemasyarakatan	129.875	116.993	246.868	14,04
8	Lainnya	10.096	390	10.486	0,60
	Jumlah	970.226	787.476	1.757.702	100,00

(Sumber: Sakernas BPS Propinsi D. I. Jogjakarta)

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK)

1. Upah

Komponen program pengupahan pada suatu organisasi memiliki delapan komponen. Salah satu komponen program pengupahan adalah struktur upah dan gaji. Struktur upah dikatakan baik apabila struktur tersebut mencerminkan rasa keadilan (Siagian, 1984: 94). Untuk menentukan sasaran pengupahan yang adil perlu disusun struktur tugas dalam organisasi. Struktur dan penyusunan tugas yang jelas diharapkan dapat diterima secara jelas oleh pekerja, sehingga pekerja dengan mengetahui tugas yang diberikan akan mengetahui besarnya upah atau gaji yang diterimanya.

Peran pemerintah dan serikat kerja berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terhadap sistem pengupahan. Peran pemerintah disini bersumber pada wewenang pengaturan dan pengawasan yang dimilikinya. Peran pemerintah dalam pengupahan di daerah disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Sehingga setiap daerah memiliki standar kelayakan upah yang berbeda-beda, dan dikenal dengan Upah Minimum Regional (UMR). Selain peran pemerintah, serikat pekerja juga ikut berperan dalam sistem pengupahan. Serikat pekerja dalam mengambil keputusan berdasarkan suatu undang-undang yang menjamin hak berserikat bagi warga negaranya. Serikat buruh memiliki peranan dalam negosiasi dengan pihak manajemen dengan melindungi hak-hak pekerja seperti halnya melindungi tingkat penghasilan nyata yang kini telah diperoleh dan memperjuangkan perolehan pendapatan minimum yang tinggi.

Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Dalam Permen ini upah minimum dibagi dalam 3 kriteria yaitu Upah Minimum Regional, Upah Minimum Sektor Regional dan Upah Minimum Sub Sektor Regional. Dalam perkembangannya, upah minimum dibagi dari 2 kriteria yaitu Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota ini ditetapkan setahun sekali dengan SK Gubernur (www.depnakertrans.go.id)

Tabel 2.5 Upah Minimum Propinsi

NO	PROPINSI	TAHUN 2003 (RP)	TAHUN 2004 (RP)	PERSENTASE KENAIKAN (%)
1.	Nanggroe Aceh D.	425.000	550.000	29,41
2.	Sumatra Utara	505.000	537.000	6,34
3.	Sumatara Barat	435.000	480.000	10,34
4.	Riau	437.500	476.875	9,00
5.	Jambi	390.000	425.000	8,97
6.	Sumatra Selatan	403.500	460.000	14,00
7.	Bangka Belitung	379.500	447.923	18,03
8.	Bengkulu	330.000	363.000	10,00
9.	Lampung	350.000	377.500	7,86
10.	Jawa Barat	320.000	366.500	14,53

11.	DKI Jakarta	631.000	671.550	6,33
12.	Banten	475.000	515.000	8,42
13.	Jawa Tengah	340.000	365.000	7,23
14.	D.I Yogyakarta	360.000	365.000	1,39
15.	Jawa Timur	274.000	310.000	13,14
16.	Bali	410.000	425.000	3,66
17.	Nusa Tenggara Barat	375.000	412.500	10,00
18.	Nusa Tenggara Timur	350.000		
19.	Kalimantan Barat	400.000	420.000	5,00
20.	Kalimantan Selatan	425.000	482.212	13,46
21.	Kalimantan Tengah	425.000	482.250	13,47
22.	Kalimantan Timur	540.000	572.652	6,05
23.	Maluku	370.000	450.000	21,62
24.	Maluku Utara	370.000	400.000	8,11
25.	Gorontalo	410.000	430.000	4,88
26.	Sulawesi Utara	495.000	545.000	10,10
27.	Sulawesi Tenggara	390.000	470.000	20,51
28.	Sulawesi Tengah	410.000		
29.	Sulawesi Selatan	415.000	455.000	9,64
30.	Papua	600.000	650.000	8,33

(Sumber: Depnakertrans, Ditjen BHI Tahun 2004)

Penetapan UMP dan UMK tahun 2004 dilakukan pemerintah sampai tanggal 21 Januari 2004. Pada kenyataannya masih terdapat dua propinsi yang belum menetapkan UMP yaitu Propinsi NTT dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak menetapkan UMP, tetapi menetapkan UMK. Propinsi Jawa Tengah menetapkan UMK di 35 Kabupaten/Kota. UMK di Propinsi Jawa Tengah yang terendah adalah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 365.000 dan UMK tertinggi di Kota Semarang sebesar Rp 440.000. Propinsi Jawa Timur menetapkan UMK di 38 Kabupaten/Kota. UMK yang terendah terjadi di Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 310.000 dan UMK yang tertinggi di Kota Surabaya sebesar Rp 550.000.

Pada umumnya Kenaikan UMP pada tahun 2004 bervariasi untuk setiap propinsi. Kenaikan UMP terendah terjadi di DI. Yogyakarta yaitu hanya 1,39% atau Rp 5.000, sedangkan kenaikan UMP tertinggi terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 29,41% atau sebanyak Rp 196.000. Dari 30 propinsi tersebut, hanya 7 propinsi yang memiliki UMP lebih besar dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yaitu Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan 12 propinsi yang memiliki UMP lebih kecil dari KHM yaitu Propinsi, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Sementara 9 propinsi lainnya belum tersedia data KHM yaitu Propinsi Bangka Belitung, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua.

2 Pendapatan

Pendapatan merupakan sejumlah barang, jasa dan uang yang diperoleh atau diterima dalam suatu periode tertentu, misalnya satu minggu, satu bulan atau satu tahun (Depdikbud: 40). Tinggi rendahnya pendapatan seseorang tergantung pada; kecakapan dan kegiatan bekerja, keahlian dan keuletan bekerja, kesempatan yang tersedia.

Jenis pendapatan dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan nasional dan pendapatan perseorangan. Pendapatan nasional meliputi pendapatan nasional bruto dan pendapatan nasional netto. Sedangkan pendapatan perseorangan meliputi a) pendapatan nominal, yaitu pendapatan yang berupa sejumlah uang. Pendapatan nominal ini diukur dengan besarnya nilai nominal uang misalnya Rp 175.000,00. b) pendapatan nyata adalah pendapatan sejumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan pendapatan nominal.

Pendapatan nominal perseorangan berupa gaji yang telah diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja. Gaji yang diterima seorang pegawai negeri merupakan hak yang telah diatur oleh pasal 7 UU No 8 tahun 1974 (Marsono: 52). Pasal tersebut mengatur ketentuan bahwa setiap pegawai negeri berhak menerima gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji dikatakan layak apabila gaji yang diterima pegawai sebanding dengan pekerjaan yang dihasilkan dan sebanding dengan gaji yang diterima oleh karyawan yang melaksanakan pekerjaan sama di perusahaan lain. Sasaran pemberian gaji yang layak adalah para pekerja dapat menghidupi kebutuhan keluarganya

sehingga para karyawan dapat memusatkan perhatian dalam pekerjaan yang diberikannya.

Dalam penggajian pegawai negeri terdapat komponen yang mempengaruhi besar kecilnya gaji yang diterima, diantaranya; pangkat atau golongan karyawan yang bersangkutan, masa kerja karyawan, susunan keluarga, jabatan karyawan yang disandangnya. Bentuk kepangkatan pegawai negeri berpengaruh terhadap penggajian. Bentuk kepangkatan pegawai negeri menurut PP No 7 tahun 1977 adalah terdiri dari: a) empat golongan, yaitu golongan I, II, III, IV. b) tujuh belas jenjang kepangkatan dengan Golongan I dari empat jenjang, Golongan II terdiri dari empat jenjang, Golongan III dengan empat jenjang, Golongan IV dengan lima jenjang. Penentuan penggajian dan daftar pangkat pegawai negeri dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Daftar Gaji dan Golongan/ Ruang serta Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977

NO	PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	GAJI POKOK PGPS- 1977
				MIN - MAX
1	Juru Muda	I	a	12.000 – 24.600
2	Juru Muda Tingkat I	I	b	15.700 – 30.400
3	Juru	I	c	16.500 – 33.300
4	Juru Tingkat I	I	d	17.400 – 36.300
5	Pengatur Muda	II	a	21.200 – 47.600
6	Pengatur Muda Tkt I	II	b	26.900 – 55.700
7	Pengatur	II	c	28.200 – 59.400
8	Pengatur Tingkat I	II	d	29.600 – 63.200
9	Penata Muda	III	a	34.100 – 74.900
10	Penata Muda Tkt I	III	b	35.900 – 79.100
11	Penata	III	c	37.800 – 83.400
12	Penata Tingkat I	III	d	39.800 – 87.800
13	Pembina	IV	a	42.200 – 99.800
14	Pembina Tingkat I	IV	b	44.700 – 101.700

15	Pembina Utama Muda	IV	c	47.300 – 109.700
16	Pembina Utama Madya	IV	d	50.000 – 114.800
17	Pembina Utama	IV	e	52.800 – 120.000

(Sumber: Marsono,1974: 59)

3. Biaya Pendidikan

Berkaitan dengan pengeluaran dalam pembiayaan pendidikan, pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban negara dan orang tua. Dalam hal ini peran orang tua dalam pendidikan adalah memberikan iuran sekolah untuk membiayai kebutuhan pendidikan anaknya (Daroestan,1975:22). Salah satu bentuk pembiayaan pendidikan adalah dengan ikut membayar iuran yang telah ditetapkan oleh sekolah, yayasan atau pemerintah.

Pengertian biaya pendidikan adalah segala pengeluaran keluarga siswa yang berkaitan dengan pendidikan siswa di sekolah(Dedi supriadi 2003:38 dalam Sri utami)). Biaya pendidikan meliputi: a) sumbangan yang bersifat rutin seperti iuran rutin sekolah b) sumbangan yang bersifat insidental yang diterima atau dikelola oleh sekolah seperti uang pangkal, iuran OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, atau sumbangan-sumbangan insidental lainnya. c) biaya-biaya langsung yang disalurkan oleh pihak sekolah maupun dibelanjakan sendiri oleh keluarga siswa namun semua atau sebagian siswa tetap harus memenuhinya seperti biaya pembelian buku pelajaran, buku tulis dan alat-alat tulis, pakaian seragam dan atribut sekolah, pakaian olah raga dan lain-lain. d). biaya tidak langsung yang dibayarkan tidak melalui sekolah namun mendukung atau merupakan bagian dari biaya proses pendidikan

siswa seperti biaya transportasi kesekolah, biaya karyawisata, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Moch Idochi Anwar 2003: 143-144 dalam Sri utami biaya pendidikan dikumpulkan dari pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, uang sekolah (SPP), sumber pribadi atau pemasukan dari orang tua. Kategori biaya pendidikan menurut Moch. Idochi Anwar 2003: 141-142 dalam Sri utami adalah sebagai berikut: a) Biaya langsung. Biaya langsung terwujud dalam pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan meliputi gaji guru dan pegawai, pembelian buku, pembelian tanah, bangunan laboratorium. b). biaya tidak langsung merupakan hilangnya uang yang dibayarkan siswa karena mengikuti pendidikan.

4. Internal Rate Return (IRR)

Konsep biaya dalam proses produksi merupakan pengorbanan-pengorbanan yang mutlak harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu hasil. Pengorbanan yang dikeluarkan untuk membiayai bahan baku, tenaga kerja, dan pembiayaan lain dalam proses produksi. Biaya dalam melakukan suatu produksi dapat dibedakan menjadi lima, yaitu: 1) biaya langsung dan biaya tidak langsung, 2) biaya tetap dan biaya tidak tetap, 3) biaya pengganti dan biaya histories, 4) biaya yang diperhitungkan karena kehilangan kesempatan dan biaya yang merupakan pengeluaran, 5) biaya menurut pembukuan dan biaya yang nyata dikeluarkan (Wasis, 1984: 50).

Pendidikan juga dapat dikatakan sebagai proses produksi. Proses produksi untuk membentuk manusia seutuhnya dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam pendidikan membutuhkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam hal proses berlangsungnya suatu pendidikan. Biaya pendidikan tersebut membiayai aktivitas siswa baik yang berkaitan dengan sekolah maupun sarana penunjang pendidikan. Sehingga dalam hal ini biaya pendidikan dilihat dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung, serta biaya yang diperhitungkan karena kehilangan kesempatan (Opportunity cost). Opportunity cost yang dimaksud adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengganti kehilangan kesempatan untuk menghasilkan sesuatu, misalnya bekerja. Tetapi pilihan untuk melakukan pendidikan dengan mengeluarkan biaya pendidikan merupakan pilihan yang memiliki nilai lebih tinggi sehingga pada saat sekarang lebih mengorbankan opportunity cost. Pengorbanan yang dilakukan tersebut dapat dihitung berdasarkan data prosentase, sehingga dapat dikatakan sebagai biaya balik modal atau IRR (Internal Rate Return).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah penelitian Biki rugaya tahun 2001 yang berjudul “Perilaku Ekonomi Masyarakat Nelayan di Pulau-pulau kecil di Wilayah Kota Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor umur dan jenis kelamin tenaga kerja keluarga nelayan untuk berpartisipasi dalam kegiatan produksi. Variabel penelitian adalah umur, jenis

kelamin tenaga kerja dan Tingkat partisipasi dalam kegiatan produksi. Variabel bebas adalah Umur dan jenis kelamin tenaga kerja, sedangkan variabel terikatnya adalah Tingkat partisipasi dalam kegiatan produksi. Penentuan sample secara acak di setiap pulau yang termasuk dalam wilayah Manado.

Analisis data dengan menggunakan Uji Chi Square untuk menguji hubungan antara umur dan jenis kelamin tenaga kerja dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan produksi. Hasil penelitian tentang aspek perilaku produksi menunjukkan bahwa: 1) faktor umur tenaga kerja nelayan mempunyai hubungan erat dengan tingkat partisipasi tenaga kerja dalam kegiatan produksi, yaitu kelompok tenaga kerja usia sedang mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi sebesar 60,53%. Tingkat partisipasi tenaga kerja usia muda sebesar 23,68%, sedangkan tenaga kerja usia tua mempunyai tingkat partisipasi sebesar 15,79%. 2) faktor jenis kelamin tenaga kerja menunjukkan bahwa tenaga kerja laki-laki mempunyai tingkat partisipasi: tinggi 43,93%, sedang 49,13%, rendah 6,94%. Tenaga kerja perempuan mempunyai tingkat partisipasi: tinggi 0%, sedang 29,36% dan rendah 70,64%.

Penelitian lainnya adalah penelitian oleh Herlina Tahun 2007. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Variabel- Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Kabupaten Hulu sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel (Umur, Upah, Tingkat pendidikan, dan Jumlah Tanggungan

keluarga) yang berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan dan juga untuk mengetahui variabel yang potensial berpengaruh secara dominan diantara keempatnya.

Alat analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu program komputer SPSS 11. Hasil analisis data diperoleh bahwa: 1) variabel umur dan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal tersebut terjadi karena dengan bertambahnya usia seseorang maka akan ada tekanan sosial yang menghendaki para usia kerja untuk masuk dalam dunia kerja. Sedangkan untuk tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar pula keinginan untuk bekerja. 2) Variabel Upah dan Tanggungan keluarga memiliki hubungan negatif terhadap Tingkat partisipasi kerja wanita di kabupaten hulu sungai selatan. Tanggungan keluarga memiliki hubungan negatif dengan TPAK wanita dikarenakan semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin besar waktu wanita yang digunakan untuk mengurus tanggungan keluarga tersebut daripada aktif untuk bekerja mencari pendapatan. Sedangkan hubungan negatif upah dengan TPAK wanita, karena kecilnya upah rata-rata yang diterima di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari pada penghasilan yang diterima. Akibatnya menyebabkan nilai TPAK wanita cenderung turun.

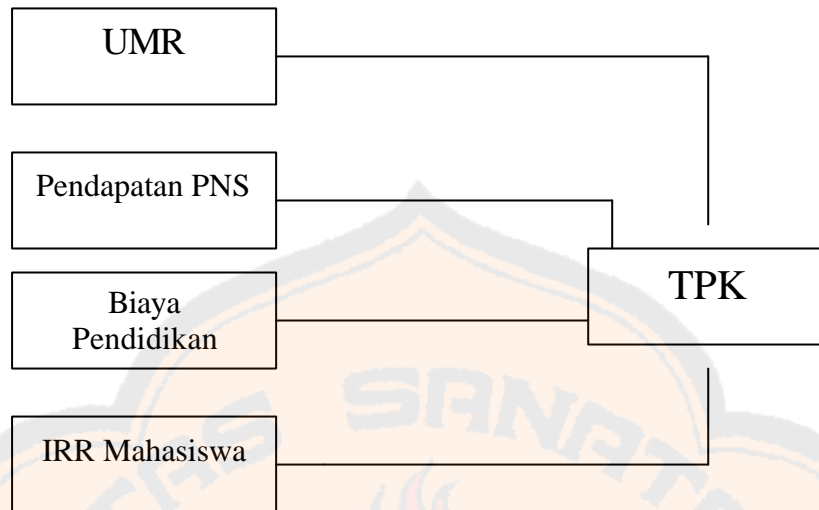
E. Kerangka Berpikir

Jumlah penduduk yang besar merupakan bagian dari penyediaan tenaga kerja suatu Negara. Penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tenaga kerja, jam kerja, dan pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang besar dapat menunjang permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk di suatu negara. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah, mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 1996: 2). Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan memiliki jumlah penduduk yang besar akan berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja dan semakin besar penyediaan tenaga kerja akan berkaitan dengan tingkat partisipasi penduduk untuk bekerja. Partisipasi penduduk yang tinggi untuk bekerja akan pemeratakan pendapatan masyarakat, karena kegiatan ekonomi juga dilakukan oleh penduduk sampai ke daerah-daerah.

Tenaga kerja merupakan roda penggerak bagi perekonomian bangsa. Keadaan Perekonomian berpengaruh terhadap permintaan tenaga dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja di pengaruhi oleh jumlah penduduk yang tersedia dan tingkat partisipasi penduduk untuk bekerja. Keputusan orang untuk berkerja menyebabkan meningkatnya tingkat partisipasi kerja. Dengan penambahan tingkat partisipasi kerja berarti akan menambah penawaran kerja di pasar. Penambahan tingkat partisipasi kerja tersebut memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor seperti: besarnya

tingkat UMR, Pendapatan PNS, Biaya pendidikan, IRR mahasiswa. Besar kecilnya tingkat UMR akan menyebabkan orang memutuskan untuk bekerja. Apabila UMR mengalami kenaikan, maka akibatnya banyak orang memilih untuk bekerja sehingga tingkat partisipasi kerja naik. Pendapatan PNS terkait dengan besarnya tingkat partisipasi kerja, alasannya karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan tinggi akan memilih bekerja dan mencari pekerjaan sebagai PNS yang berpenghasilan tetap. Sehingga apabila Pendapatan PNS naik maka tingkat partisipasi kerja juga mengalami kenaikan. Untuk biaya pendidikan memiliki perbandingan searah dengan tingkat partisipasi kerja. Apabila biaya pendidikan mahal, kecenderungan orang akan memutuskan untuk bekerja sehingga akan menambah besarnya tingkat partisipasi kerja sebaliknya apabila biaya pendidikan rendah kebanyakan orang memilih untuk melanjutkan pendidikan dari pada bekerja sehingga akibatnya tingkat partisipasi kerja menjadi rendah. Sedangkan IRR mahasiswa juga berpengaruh terhadap besarnya tingkat partisipasi kerja. Mahasiswa yang telah lulus kebanyakan sebagai penyedia tenaga kerja dan tingkat kelulusan yang tinggi akan menyebabkan tingkat partisipasi kerja yang tinggi. Alasannya mahasiswa tersebut bersaing untuk cepat mendapatkan pekerjaan karena mengingat besarnya biaya yang dulu telah dikeluarkan dalam pembiayaan selama kuliah.

Dari uraian diatas mengenai hubungan antara UMR, Pendapatan PNS, Biaya pendidikan, dan IRR mahasiswa terhadap besarnya Tingkat Partisipasi Kerja dapat dijelaskan dengan bagan sebagai berikut:



Keterangan:

----- = Memiliki hubungan negatif

————— = Memiliki hubungan positif

F. HIPOTESIS

Dari rumusan masalah penelitian dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara UMR dengan TPK (Tingkat Partisipasi Kerja)
2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pendapatan PNS dengan TPK (Tingkat Partisipasi Kerja)
3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Biaya Pendidikan dengan TPK (Tingkat Partisipasi Kerja)
4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara IRR mahasiswa dengan TPK (Tingkat Partisipasi Kerja)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau suatu daerah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tentang siapa, kapan, apakah, dimana, dan bagaimana dari suatu topik penelitian (Sumarni, 2006)

2. Korelasi

Penelitian ini dikatakan korelasi karena penelitian ini melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan antara variabel. Menurut Nazir dalam Sukardi, penelitian korelasi diperlakukan sebagai penelitian deskriptif. Alasannya karena penelitian tersebut berusaha menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan kondisi yang sekarang dalam konteks kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel (Sukardi, 2003: 166)

B. Jenis dan sumber data**1. Jenis data**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu serangkaian pengukuran atau observasi yang dinyatakan dalam angka kasar karena langsung diperoleh dari hasil pengukuran dan masih berwujud catatan belum mengalami pengolahan yaitu data berbentuk angka-angka.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah menjadi suatu informasi. Dalam penelitian ini data dapat diperoleh dari BPS. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil antara tahun 1990-2005 alasannya untuk mengetahui perkembangan terakhir Tingkat partisipasi Kerja di propinsi DIY apabila dilihat dari penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 1990 Jumlah penduduk DIY sebanyak 2.912.611 Jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 3.120.478 Jiwa (<http://www.pemda-diy.go.id>). Pertumbuhan penduduk ini diharapkan dapat menyediakan jumlah angkatan kerja yang besar. Sehingga dengan penyediaan penduduk yang besar dapat meningkatkan partisipasi kerja di Propinsi D.I Yogyakarta.

C. Variabel Penelitian

- a. Upah Minimum Regional (UMR)
- b. Pendapatan PNS
- c. Biaya Pendidikan

- d. IRR (*Internal Rate Return*) Mahasiswa
- e. Tingkat Partisipasi kerja (TPK)

Variabel Independent dalam penelitian ini adalah UMR, Pendapatan PNS, Biaya Pendidikan, dan IRR Mahasiswa. Sedangkan untuk variabel dependent adalah Tingkat Partisipasi Kerja di D.I Yogyakarta

D. Definisi Operasional

1) UMR (Upah Minimum Regional)

Upah Minimum Regional adalah besarnya upah yang diterima oleh pekerja pada suatu daerah tertentu. Dalam hal ini penulis memberikan batasan UMR Daerah Istimewa Yogyakarta. UMR tersebut disesuaikan dengan pendapatan Propinsi, sehingga antara propinsi satu dengan yang lain memiliki UMR yang berbeda.

2) Pendapatan

Pendapatan adalah Upah atau gaji yang diterima dalam satu waktu tertentu. Dalam hal ini penulis memberikan batasan pada pendapatan PNS yang telah memiliki pendapatan tetap. Penulis memilih PNS untuk golongan II A yang biasanya adalah lulusan SMA. Alasannya karena sebagian besar angkatan kerja di DIY adalah lulusan SMA. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pencari kerja dengan menggunakan ijazah SMA Berdasarkan data Disnakertrans Yogyakarta terdapat 12.015 pencari pekerjaan yang terdaftar di tahun 2003. Pencari kerja terbanyak adalah lulusan SMA yaitu 6.228, kemudian lulusan sarjana sebanyak 5.045,

sarjana muda sebanyak 633, lulusan SMP sebanyak 122, dan lulusan SD sebanyak 27 orang (www.kompas.com)

3) Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan adalah sejumlah pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pendidikan seseorang di tingkat pendidikan tertentu. Dalam hal ini penulis memberikan batasan biaya pendidikan adalah biaya langsung. Biaya langsung yang dimaksud adalah biaya masuk kuliah yang meliputi uang DPP (Dana Pengembangan Pendidikan), UKT (Uang Kuliah Tetap), dan Uang SKS semester awal untuk 20 SKS.

Biaya kuliah yang akan diambil adalah untuk jurusan Manajemen, alasannya karena kebanyakan Universitas di Yogyakarta memiliki jurusan Manajemen. Untuk menghitung biaya pendidikan tersebut, peneliti akan diambil melalui sampel dari beberapa universitas di Propinsi D.I Yogyakarta. Universitas tersebut akan diwakili dari dua Universitas Negeri, tiga Universitas swasta besar, dan tiga Universitas swasta kecil. Kriteria penentuan Universitas digolongkan besar atau kecil dilihat dari jumlah program studi yang ada. Jumlah program studi yang telah terakreditasi diatas 10 dikatakan universitas tersebut dalam golongan besar, sedangkan apabila kurang dari 10 dikatakan dalam golongan universitas kecil.

Sampel dari Universitas Negeri yaitu UGM yang memiliki 18 fakultas, dan UNY yang memiliki 37 program studi. Sampel dari

Universitas Swasta besar yaitu Universitas Sanata Dharma (USD) memiliki 25 program studi, Universitas Atma Jaya memiliki 11 program studi, Universitas Islam Indonesia (UII) memiliki 21 program studi. Sedangkan sampel untuk Universitas Swasta kecil adalah Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) memiliki 15 program studi tetapi yang telah terakreditasi berjumlah 7 program studi, Universitas Janabadra memiliki 8 program studi, dan Universitas PGRI Yogyakarta memiliki 9 program studi dan yang telah terakreditasi berjumlah 4 program studi.

4) IRR (*Internal Rate Return*)

IRR merupakan tingkat biaya balik modal untuk mahasiswa setelah menyelesaikan kuliah. IRR dihitung dalam bentuk persentase. Dalam hal ini IRR mahasiswa merupakan investasi tenaga kerja dalam pendidikan. Tambahan skill tenaga kerja akan menambah keinginan untuk bekerja. Data mengenai IRR mahasiswa akan diperoleh dari BPS.

5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Dalam hal ini penulis membatasi TPAK di D.I Yogyakarta yang mengalami perubahan setiap tahunnya.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi yaitu sumber-sumber catatan dan arsip-arsip dan Literatur Data yang dicari adalah

UMR, pendapatan PNS, biaya pendidikan, IRR Mahasiswa dan Tingkat Partisipasi Kerja di Propinsi DI Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi product moment. Teknik ini digunakan untuk mencari korelasi antar dua variabel (Sudijono, 2001: 178).

Dalam penelitian ini akan dilihat: 1) korelasi antara UMR terhadap TPK. 2) korelasi antara pendapatan PNS terhadap TPK. 3) korelasi Biaya pendidikan terhadap TPK. 4) korelasi IRR mahasiswa terhadap TPK.

Untuk menghitung korelasi kedua variabel tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan skor mentah (Furchan, 1982: 176) .

Rumusnya sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left[\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N} \right] \left[\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N} \right]}}$$

Keterangan:

r = person r

$\sum X$ = Jumlah skor sebaran X

$\sum Y$ = Jumlah skor sebaran Y

$\sum XY$ = Jumlah hasil kali skor- X dan skor- Y yang berpasangan

$\sum X^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X

$\sum Y^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y

N = Banyaknya skor-X dan skor-Y yang berpasangan (Banyaknya subjek)

Dari perhitungan korelasi tersebut dapat dibaca dengan cara menginterpretasikan perhitungan koefisien korelasi yang diperoleh (nilai r). Di bawah ini terdapat tabel untuk memberikan koefisien interpretasi korelasi (Sugiyono, 2001:183).

Tabel 3.1 PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRENTASI KOEFISIEN KORELASI

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Keadaan Geografis Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Letak Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada 7° 15- 8° 15 Lintang selatan dan garis 110° 5- 110° 4 bujur timur. Daerah istimewa yogyakarta memiliki batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo(Jawa Tengah). Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Magelang(Jawa Tengah). Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Klaten(Jawa Tengah). Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri(Jawa Tengah). Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia(www.gudeg.net)

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km². Luas wilayah tersebut terdiri dari luas Kota Madya Yogyakarta 32,50 km², luas Kabupaten Sleman 574,82 km², luas Kabupaten Bantul 506,85 km², luas Kabupaten Kulon Progo 586,27 km², dan luas Kabupaten Gunung Kidul 1485,36 km².

2. Iklim dan Keadaan Alam

Iklim di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari temperatur harian rata-rata yang berkisar antara 26,6° C sampai 28,8° C, Kelembaban udara rata-rata mencapai 74%. Sedangkan curah hujan memiliki variasi antara 3 mm sampai 496 mm. Curah hujan tertinggi 496 mm terjadi pada bulan Februari, curah

hujan terendah 3 mm sampai 24 mm terjadi pada bulan mei sampai oktober.

Curah hujan tahunan rata-rata Propinsi DIY sebesar 1855 mm.

Keadaan Alam Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: a) Bagian utara memiliki luas lebih kurang 4% tanah miring (kelanjutan dari gunung berapi), memiliki sifat wilayah hujan, kaya akan mata air dan sangat subur. b) Bagian selatan/ barat memiliki luas lebih kurang 7 % dari barat kearah selatan dengan ketinggian semakin rendah berakhir pada daratan pantai alluvial, dengan sifat wilayah hujan dan banyak mata air. c) Bagian tengah memiliki luas 41% merupakan tanah datar/ ngarai dengan sifat tanah cukup subur, jaringan pengairan baik dan penduduk yang padat.

B. Sejarah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Propinsi yang mempunyai status sebagai Daerah Istimewa. Status Daerah Istimewa ini berkaitan dengan sejarah berdirinya propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1945. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan gabungan dari wilayah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kedua wilayah tersebut secara resmi menggabungkan diri dengan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam

pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945.

Pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan

sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir. Moh Enoch mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

Mengacu pada UU No 3 Tahun 1950 jo No 19 Tahun 1950 wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi dalam 5 Daerah Tingkat II yang terdiri dari satu Kota Madya dan empat Kabupaten, yaitu: a) Kota Madya

Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan. b) Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Desa. c) Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Desa. d) Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, terdiri dari 12 Kecamatan dan 75 Desa. e) Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul, terdiri dari 18 Kecamatan dan 144 Desa.

C. Penduduk dan KetenagaKerjaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan penduduk tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu program KB dan migrasi antar daerah. Kedua faktor ini berpengaruh dalam hal pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada periode 1984 – 1991 pertumbuhan penduduk menunjukkan angka sebesar 0,77% dengan rata-rata pertumbuhan laki-laki 0,79% dan pertumbuhan rata-rata untuk wanita sebesar 0,76% (students.ukdw.ac.id)

Pada Tahun 2004 penduduk DIY tercatat sebanyak 3.220.808 jiwa. Persentase penduduk laki-laki dan perempuan mengalami perimbangan. Persentase sebesar 49,19% untuk laki-laki dan 50,81% untuk perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk pada tahun yang sama yaitu sebesar 0,42%. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di kota Yogyakarta sebesar 1,79% , untuk pertumbuhan penduduk terkecil adalah di Kabupaten Bantul sebesar 0,07%. Sedangkan Tahun 2005 Jumlah penduduk di Propinsi DIY

menjadi 3.281.800 jiwa. Pertambahan penduduk tersebut dikarenakan pertumbuhan penduduk propinsi DIY berubah menjadi 1,88%. Selain itu pertumbuhan penduduk di kabupaten/ kota juga mengalami perubahan. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di kota Yogyakarta sebesar 5,50%, kabupaten Bantul pertumbuhan penduduk berubah menjadi 0,91. sehingga dapat dikatakan bahwa setiap tahun penduduk di Propinsi D.I. Yogyakarta mengalami penambahan penduduk. Data mengenai Jumlah penduduk Propinsi DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tabel Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta 2003-2005

No	Kabupaten/ kota	Rumah Tangga	Penduduk			Seks Ratio	Pertum- buan
			Laki-laki	Perem- puan	Jumlah		
1	Kulon Progo	106.896	192.988	193.698	386.686	0,99	2,83
2	Bantul	240.522	401.172	422.562	823.734	0,95	0,91
3	Gunung Kidul	200.800	340.862	354.886	695.748	0,96	1,30
4	Sleman	318.423	482.810	472.314	955.124	1,02	1,18
5	Yogyakarta	151.420	197.505	223.003	420.508	0,89	5,50
	Total Tahun 2005	1.018.061	1.615.337	1.666.463	3.281.800	0,97	1,88
	Tahun 2004	959.552	1.584.421	1.636.387	3.220.808	0,97	0,42
	Tahun 2003	922.636	1.595.183	1.612.202	3.207.385	0,99	1,61

(Sumber: Susenas, BPS Propinsi D.I. Yogyakarta tahun 2003-2005)

Pertumbuhan penduduk yang berkembang setiap tahun di Propinsi DIY berpengaruh pada persediaan jumlah tenaga kerja yang ada. Seperti halnya pada tahun 2004 jumlah tenaga kerja sebesar 1.815.362 orang mengalami peningkatan menjadi 1.851.209 orang. Persentase penambahan jumlah angkatan kerja sebesar 1,93%. Jumlah tersebut tersebar pada delapan sector lapangan usaha. Sektor pertanian memiliki jumlah tenaga kerja yang paling banyak sebesar 634.421 orang. Sedangkan untuk sektor perdagangan menempati urutan kedua dengan jumlah tenaga kerja sebesar 426.378 orang. Untuk sector industri memiliki jumlah tenaga kerja sebesar 240.273 orang.

Data mengenai lapangan kerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut Lapangan Usaha Utama di Propinsi D.I. Jogjakarta tahun 2005

NO	Lapangan Usaha Utama	Penduduk			
		Laki- laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Pertanian	331.043	303.378	634.421	36,09
2	Industri Pengolahan	124.484	115.789	240.273	13,67
3	Bangunan	108.305	2.381	110.686	6,29
4	Perdagangan besar, Eceran, dan Rumah Makan	196.374	230.004	426.378	24,26
5	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	50.061	8.806	58.867	3,35
6	Keuangan, Asuransi, Persewaan Bangunan/ Tanah, Jasa Perusahaan	19.988	9.735	29.723	1,69
7	Jasa Kemasyarakatan	129.875	116.993	246.868	14,04
8	Lainnya	10.096	390	10.486	0,60
	Jumlah	970.226	787.476	1.757.702	100,00

(Sumber: Sakernas BPS Propinsi D. I. Jogjakarta)

Propinsi DIY memiliki kawasan penghasil produk yang tersebar di Kabupaten dan Kotamadya. Kawasan tersebut menghasilkan produk-produk unggulan tertentu. Kawasan sektor usaha pertanian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Produk yang dihasilkan adalah sayuran fresh (*Frozen*), buah-buahan, Asparagus, rebung dalam kaleng. Sedangkan kawasan industri di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta tersebar di Kabupaten Bantul, Gunung kidul dan Kotamadya Yogyakarta. Data kawasan industri sebagai berikut:

Tabel 4.3 Lokasi Industri di Propinsi D.I Yogyakarta

No	Nama Produksi	Lokasi Industri
1	Perak/ Silver	Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta
2	Batik	Desa Wijirejo dan Wukirsari, Kab.Bantul
3	Kerajinan kayu/ woodcraft	Kerajinan Kayu Putat, Gunung kidul Kerajinan Kayu Pucung, Bantul Kerajinan kayu Pajangan, Bantul
4	Pakaian Jadi/ Garment	Mlangi, kab. Sleman Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta Imogiri, kab. Bantul
5	Anyaman/ Plaited Material	Moyudan, kab, Sleman Minggir, Kab. Sleman Muntuk, kab. Bantul Ngawen, kab. Gunung Kidul
6	Kerajinan Gerabah/ Eartheware Vessel	Kasongan, Kab. Bantul Pundong, Kab. Bantul

(Sumber: www.bi.go.id)

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Analisis data melihat pengujian normalitas dan pengujian hipotesis korelasi *product moment* dari person yang dilakukan oleh peneliti. Hasil dari pengujian tersebut sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data untuk masing-masing variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengolahan uji normalitas dilakukan peneliti dengan bantuan SPSS versi 12.0. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-smirnov sebagai berikut:

Tabel 5.1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		TPAK	UMR	pendtp ns	biayapenddk n	IRRmhs
N		16	16	16	16	16
Normal Parameters(a,b)	Mean	67,2000	164015,63	305987, 50	4131235,94	5,6363
	Std. Deviation	3,01291	131471,49 5	284874, 636	2773340,899	1,39706
Most Extreme Differences	Absolute	,142	,227	,355	,201	,157
	Positive	,122	,227	,355	,201	,105
	Negative	-,142	-,149	-,190	-,139	-,157
Kolmogorov-Smirnov Z		,569	,908	1,419	,803	,628
Asymp. Sig. (2-tailed)		,902	,381	,036	,540	,826

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data primer 2008

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas:

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Dari Uji normalitas yang menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dapat diambil keputusan sebagai berikut:

a. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)

Uji normalitas TPAK menunjukkan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,902.

Hal ini berarti $0,902 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan data probabilitas TPAK tahun 1990 -2005 adalah normal.

b. UMR (Upah Minimum Regional)

Uji normalitas UMR menunjukkan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,381.

hal ini berarti $0,381 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan probabilitas UMR tahun 1990 – 2005 adalah normal.

c. Pendapatan PNS

Uji normalitas pendapatan PNS menunjukkan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,036. Hal ini berarti $0,036 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan probabilitas pendapatan PNS tahun 1990 – 2005 adalah tidak normal.

d. Biaya Pendidikan

Uji normalitas biaya pendidikan menunjukkan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,540. Hal ini berarti $0,540 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Ho diterima dan probabilitas biaya pendidikan tahun 1990 – 2005 adalah normal.

e. IRR Mahasiswa

Uji normalitas biaya pendidikan menunjukkan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,826. Hal ini berarti $0,826 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan probabilitas IRR mahasiswa tahun 1990 – 2005 adalah normal.

Kesimpulan yang diperoleh dalam analisis melalui uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov adalah normal, kecuali variabel pendapatan PNS berdistribusi tidak normal.

2. Uji Hipotesis

Pengambilan keputusan perlu memperhatikan hipotesis yang digunakan:

Ho: tidak ada hubungan(korelasi) antara dua variabel atau angka korelasi 0.

Hi: Ada hubungan(korelasi) antara dua variabel atau angka korelasi tidak 0.

selain itu pengambilan keputusan melihat probabilitas,

Jika probabilitas $> 0,05$ maka Ho diterima

Jika Probabilitas $< 0,05$ maka Ho ditolak

Tabel Uji korelasi Product moment dari person dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2 Tabel Uji korelasi Product moment dari Pearson

		Correlations				
		TPAK	UMR	pendtpns	biayapenddk n	IRRmhs
TPAK	Pearson Correlation	1	,747(**)	,703(**)	,747(**)	,512(*)
	Sig. (2-tailed)	.	,001	,002	,001	,042
	N	16	16	16	16	16
UMR	Pearson Correlation	,747(**)	1	,968(**)	,992(**)	,682(**)
	Sig. (2-tailed)	,001	.	,000	,000	,004
	N	16	16	16	16	16
pendtpns	Pearson Correlation	,703(**)	,968(**)	1	,965(**)	,681(**)
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	.	,000	,004
	N	16	16	16	16	16
biayapenddkn	Pearson Correlation	,747(**)	,992(**)	,965(**)	1	,707(**)
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	.	,002
	N	16	16	16	16	16
IRRmhs	Pearson Correlation	,512(*)	,682(**)	,681(**)	,707(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,042	,004	,004	,002	.
	N	16	16	16	16	16

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : data primer 2008

a. Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara UMR dengan Tingkat Partisipasi Kerja tahun 1990 – 2005. Berdasarkan r hitung UMR dalam tabel menunjukkan angka 0.747 dan pada kolom signifikasi didapat probabilitas $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara UMR dengan Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) pada tahun 1990 – 2005.

b. Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) tahun 1990 – 2005. Berdasarkan r hitung pendapatan PNS dalam tabel menunjukkan angka 0,703 dan pada kolom signifikasi didapat probabilitas $0,002 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) tahun 1990 – 2005.

c. Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara biaya pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) tahun 1990 – 2005. Berdasarkan r hitung biaya pendidikan dalam tabel menunjukkan angka 0,747 dan pada kolom signifikasi didapat probabilitas $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara biaya pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) tahun 1990 – 2005.

d. Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara IRR Mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) tahun 1990 – 2005. Berdasarkan r hitung IRR mahasiswa dalam tabel menunjukkan

angka 0,512 dan pada kolom signifikasi didapat probabilitas $0,042 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara IRR mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi kerja (TPK) tahun 1990 – 2005.

B. Pembahasan

Pada bagian pembahasan akan dibahas mengenai hipotesis pertama mengenai hubungan antara UMR dengan Tingkat Partisipasi Kerja(TPK), hipotesis kedua mengenai hubungan antara pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi Kerja(TPK), hipotesis ketiga mengenai hubungan antara biaya pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Kerja(TPK), dan hipotesis keempat mengenai hubungan antara IRR Mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi Kerja (TPK). Pembahasan hipotesis tersebut sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara UMR dengan Tingkat Partisipasi Kerja(TPK) pada tahun 1990 – 2005. Dari analisis data yang menggunakan korelasi pearson diperoleh probabilitas UMR dengan Tingkat Partisipasi Kerja sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan melihat hasil probabilitas tersebut artinya H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara UMR dengan Tingkat Partisipasi Kerja(TPK). Tabel korelasi Pearson menunjukkan angka korelasi sebesar 0,747. angka 0,747 menunjukkan korelasi antara UMR dengan Tingkat

Partisipasi Kerja(TPK) yang kuat. Hubungan yang positif dan signifikan antara UMR dengan TPK pada tahun 1990 – 2005 artinya semakin tinggi UMR maka semakin tinggi pula Tingkat Partisipasi Kerja penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1990 – 2005.

Tabel 5.3 Tabel UMR Propinsi D.I Yogyakarta dan Tingkat Partisipasi Kerja Penduduk di Propinsi D.I. Yogyakarta tahun 1990 – 2005

Tahun	Upah Minimum Regional (UMR)	Tingkat Partisipasi Kerja (TPK)
1990	27.000	64,90
1991	27.000	65,00
1992	37.500	65,20
1993	48.000	63,30
1994	66.000	64,80
1995	85.500	60,60
1996	96.000	67,90
1997	106.500	69,40
1998	122.500	67,70
1999	130.000	69,61
2000	194.000	66,99
2001	237.500	67,80
2002	321.750	70,17
2003	360.000	70,30
2004	365.000	71,73
2005	400.000	69,80

Sumber: BPS Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1990 - 2005

Dari tabel UMR dan Tingkat Partisipasi Kerja menunjukkan bahwa setiap tahun UMR mengalami kenaikan. UMR tidak mengalami kenaikan terjadi sekali pada tahun 1991. Demikian pula yang terjadi dengan Tingkat partisipasi kerja di Propinsi D.I. Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan. Penurunan TPK terjadi tahun 1993, tahun 1995, tahun 1998, tahun 2000 dan tahun 2005. penurunan TPK

tersebut tidak diikuti penurunan pada tahun berikutnya tetapi pada tahun berikutnya selalu mengalami kenaikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tingkat Partisipasi Kerja di Propinsi D.I. Yogyakarta bersifat fluktuatif.

Menurut Payaman, 1996: 51, Kenaikan tingkat upah mempengaruhi penyediaan tenaga kerja melalui dua daya yang saling berlawanan. Kenaikan upah di satu pihak meningkatkan pendapatan (*Income effect*) yang cenderung mengurangi Tingkat Partisipasi Kerja (TPK). Di lain pihak peningkatan upah menyebabkan waktu menjadi mahal dan pekerjaan menjadi lebih menarik untuk menggantikan waktu senggang (*Substitution effect*). Daya substitusi dari kenaikan upah ini menyebabkan Tingkat Partisipasi kerja yang tinggi.

Penurunan Tingkat Partisipasi Kerja yang terjadi di propinsi D.I Yogyakarta tergantung pada tingkat upah yang berlaku. Pada tingkat upah yang rendah akan mendorong TPK tinggi sebab semua keluarga cenderung masuk pasar tenaga kerja, akibatnya TPK tinggi. Sebaliknya apabila tingkat upah sedang atau tinggi menyebabkan TPK turun, karena keluarga mengurangi anggota keluarga yang bekerja. Hal tersebut dilakukan karena dengan upah yang tinggi tidak perlu mengerahkan banyak orang, salah satu anggota keluarga yang bekerja sudah dirasa mencukupi kebutuhan. Mereka lebih memilih mengurus rumah tangga, atau bersekolah. Dengan anggapan demikian menyebabkan TPK turun, hal tersebut juga terjadi di Propinsi D.I Yogyakarta.

2. Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Propinsi D.I Yogyakarta pada tahun 1990 – 2005. Dari analisis data yang menggunakan analisis korelasi pearson diperoleh probabilitas pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi Kerja sebesar $0,002 < 0,05$. Dengan melihat besarnya probabilitas tersebut dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005.

Tabel Korelasi person menunjukkan besarnya korelasi antara pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi Kerja adalah 0,703. angka tersebut menunjukkan hubungan korelasi yang kuat antara pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi Kerja. Hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi kerja di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005 berarti bahwa Semakin tinggi pendapatan PNS semakin tinggi pula Tingkat Partisipasi kerja di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005.

Tabel 5.4 Tabel pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005.

Tahun	Pendapatan PNS	Tingkat Partisipasi Kerja (TPK)
1990	55.500	64,90
1991	55.500	65,00
1992	86.000	65,20
1993	110.100	63,30
1994	110.100	64,80
1995	110.100	60,60

1996	110.100	67,90
1997	182.900	69,40
1998	182.900	67,70
1999	182.900	69,61
2000	182.900	66,99
2001	620.600	67,80
2002	620.600	70,17
2003	725.600	70,30
2004	725.600	71,73
2005	834.400	69,80

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Gaji pokok PNS tahun 1990- 2005.

Tabel pendapatan PNS menunjukkan gaji pokok yang diterima oleh PNS tidak setiap tahun mengalami kenaikan. Kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil diatur oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah mengenai penggajian pegawai negeri sipil. Selama tahun 1990 sampai dengan 2005 terjadi enam kali kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil yaitu tahun 1992, tahun 1993, tahun 1997, tahun 2001, tahun 2003, dan tahun 2005. Gaji pokok PNS pada tahun 1990 sebesar Rp 55.500,- mengalami kenaikan pada tahun 1992 sebesar Rp 86.000,- dan pada tahun 1993 naik menjadi Rp 110.100,- kemudian diikuti perubahan peraturan untuk kenaikan gaji tahun 2001, 2003 dan tahun 2005.

Kenaikan gaji pokok PNS tersebut tidak rutin setiap tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan PNS mengalami kenaikan sesuai ketentuan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan tingkat partisipasi kerja di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005 bersifat fluktuatif. Tingkat Partisipasi kerja di Propinsi D.I Yogyakarta mengalami penurunan pada tahun tertentu tetapi pada tahun berikutnya mengalami kenaikan. Contoh hal tersebut adalah pada tahun

1992 TPK sebesar 65,20 tahun 1993 turun menjadi 63,30, tetapi pada tahun 1994 TPK di provinsi D.I Yogyakarta naik menjadi 64,80. sehingga dapat dikatakan TPK di Yogyakarta mengalami kenaikan dan terkadang mengalami penurunan yang tidak begitu besar.

Keterkaitan antara Pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Provinsi D.I Yogyakarta menunjukkan hasil yang positif. Seperti halnya tahun 1992 kenaikan pendapatan PNS menyebabkan kenaikan TPK pada tahun tersebut. Pendapatan PNS yang mengalami kenaikan akan menyebabkan *substitusi effect* yang lebih dominan bila dibandingkan dengan *income effect* (Payaman, 1996: 52). Hal tersebut terjadi karena penghargaan terhadap waktu yang relatif mahal sehingga pekerjaan menjadi lebih menarik dan orang akan senang bekerja dalam mengisi waktu luang. Penghargaan terhadap waktu yang mahal menyebabkan peningkatan pencari kerja, secara khusus untuk menjadi pegawai negeri sipil. Peningkatan pencari kerja tersebut mendorong meningkatnya tingkat partisipasi kerja. Sedangkan *income effect* dapat menyebabkan partisipasi kerja turun karena anggapan bahwa mereka sudah merasa cukup dengan pendapatan yang diterimanya. Berdasarkan anggapan tersebut menyebabkan orang enggan mengisi waktu luang mereka untuk bekerja.

3. Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara biaya pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Provinsi

D.I Yogyakarta pada tahun 1990 – 2005. Dari analisis data yang menggunakan analisis korelasi pearson diperoleh probabilitas biaya pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Kerja sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan melihat besarnya probabilitas tersebut dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara biaya pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005.

Tabel Korelasi person menunjukkan besarnya korelasi antara biaya pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Kerja adalah 0,747. angka tersebut menunjukkan hubungan korelasi yang kuat antara biaya pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Kerja. Hubungan yang positif dan signifikan antara biaya pendidikan dengan Tingkat Partisipasi kerja di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005 berarti bahwa Semakin tinggi biaya pendidikan semakin tinggi pula Tingkat Partisipasi kerja di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005. Tabel berikut ini merupakan hubungan biaya pendidikan di Propinsi D.I Yogyakarta dan TPK di Propinsi D.I Yogyakarta.

Tabel 5.5 Perkembangan biaya pendidikan dan TPK di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 -2005

Tahun	Biaya Pendidikan	Tingkat Partisipasi Kerja (TPK)
1990	1.117.300	64,90
1991	1.338.250	65,00
1992	1.672.375	65,20
1993	1.757.600	63,30
1994	2.085.300	64,80
1995	2.524.300	60,60
1996	2.881.250	67,90
1997	2.865.500	69,40

1998	3.150.700	67,70
1999	3.634.800	69,61
2000	4.443.300	66,99
2001	5.560.000	67,80
2002	6.367.500	70,17
2003	8.485.000	70,30
2004	8.988.300	71,73
2005	9.228.300	69,80

Sumber: Hasil rata-rata biaya pendidikan di UGM, UNY, USD, UAJY, UII, dan Universitas PGRI Yogyakarta

Tabel biaya pendidikan menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Kenaikkan pembiayaan pendidikan tersebut terkait dengan pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua dalam membiayai anaknya biasanya berbentuk biaya langsung (Supriadi, 2006: 4). Biaya langsung yang dimaksud adalah Pengeluaran keluarga untuk membiayai anaknya dalam hal membayar iuran-iuran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sehingga apabila pembiayaan untuk pendidikan selalu mengalami kenaikan, orang tua biasanya memutuskan agar anak-anaknya bekerja dari pada sekolah. Dengan beralihnya anak-anak usia sekolah ke dalam dunia kerja akan menambah penawaran tenaga kerja, akibatnya Tingkat partisipasi kerja juga mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi menyebabkan orang cenderung untuk bekerja, dan akhirnya menyebabkan tingkat partisipasi kerja yang tinggi pula.

4. Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara IRR Mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Propinsi D.I Yogyakarta pada tahun 1990 – 2005. Dari analisis data yang menggunakan analisis korelasi pearson diperoleh probabilitas IRR Mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi Kerja sebesar $0,042 < 0,05$. Dengan melihat besarnya probabilitas tersebut dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara IRR Mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi Kerja di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005.

Korelasi person menunjukkan besarnya korelasi antara IRR Mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi Kerja adalah 0,512. angka tersebut menunjukkan hubungan korelasi yang sedang antara IRR Mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi Kerja. Hubungan yang positif dan signifikan antara biaya pendidikan dengan Tingkat Partisipasi kerja di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005 berarti bahwa Semakin tinggi IRR Mahasiswa semakin tinggi pula Tingkat Partisipasi kerja di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005. Keterkaitan antara IRR Mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi Kerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.6 Perkembangan IRR Mahasiswa dan tabel Tingkat Partisipasi Kerja di Propinsi D.I Yogyakarta pada tahun 1990 – 2005.

Tahun	IRR Mahasiswa	Tingkat Partisipasi Kerja (TPK)
1990	2,11	64,90
1991	4,69	65,00
1992	4,14	65,20
1993	4,46	63,30

1994	6,04	64,80
1995	6,20	60,60
1996	5,64	67,90
1997	5,36	69,40
1998	6,32	67,70
1999	5,97	69,61
2000	4,68	66,99
2001	7,27	67,80
2002	6,05	70,17
2003	6,95	70,30
2004	7,90	71,73
2005	6,40	69,80

Sumber: Susenas BPS Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 - 2005

Dari Tabel IRR Mahasiswa menunjukkan perkembangan IRR mahasiswa yang bersifat fluktuatif di Propinsi D.I Yogyakarta. IRR mahasiswa mengalami kenaikan pada tahun- tahun sebelumnya tetapi pada tahun berikutnya mengalami sedikit penurunan, kemudin mengalami kenaikan lagi. Seperti halnya IRR tahun 1990 sebesar 2,11 mengalami kenaikan pada tahun 1991 menjadi 4,69, tetapi pada tahun 1992 mengalami penurunan yaitu sebesar 4,14. Pada tahun berikutnya 1994 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,04. Kenaikan dan penurunan IRR mahasiswa tersebut dapat disebabkan oleh keputusan seseorang untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi atau tidak. Harapan setelah lulus dari sekolah yang lebih tinggi akan memperoleh pendapatan yang lebih baik sehingga sesuai dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkannya dulu.

Menurut Payaman (1996: 72) IRR dari melanjutkan sekolah dalam waktu tertentu adalah tingkat diskonto yang mempersamakan hasil dari melanjutkan sekolah tersebut dengan biaya total. Sehingga dapat dikatakan keputusan yang

diambil untuk melanjutkan sekolah menurut tabel IRR mahasiswa berdasarkan Susenas adalah pada tingkat bunga kurang dari 2,11 pada tahun 1990 banyak seseorang untuk mengambil keputusan bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

Keterkaitan IRR Mahasiswa dengan Tingkat partisipasi kerja adalah dengan IRR mahasiswa yang lebih tinggi pada masa mendatang akan menyediakan penawaran kerja yang tinggi dengan tingkat kualitas kerja yang tinggi, sehingga Tingkat Partisipasi Kerja juga Tinggi. IRR mahasiswa merupakan investasi *human capital*. Investasi yang dimaksud adalah investasi dalam hal pelatihan, pengembangan *skill*. Sehingga dengan tambahan beberapa tahun untuk melanjutkan pendidikan nantinya akan meningkatkan kemampuan kerja seseorang dan juga akan meningkatkan pendapatan yang diterima seseorang. Pengorbanan yang dikeluarkan untuk biaya sekolah ke jenjang yang lebih tinggi akan sebanding dengan pendapatan yang diterima nantinya setelah seseorang bekerja. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka nilai waktu semakin berharga (Payaman, 1996: 53). Penghargaan waktu yang relatif mahal akan menyebabkan orang menggunakan waktu luang untuk bekerja. Dengan demikian keputusan bekerja untuk menggunakan waktu yang luang akan meningkatkan partisipasi kerja.

BAB VI

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan dalam bab V, maka hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai r hitung sebesar 0,747 dan pada kolom signifikasi diperoleh probabilitas sebesar 0,001. Nilai probabilitas menunjukkan $0,001 < 0,05$, maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara UMR (Upah Minimum Regional) dengan Tingkat Partisipasi Kerja(TPK) di Propinsi D.I Yogyakarta pada tahun 1990 – 2005.

2. Hipotesis Kedua

Dalam pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai r hitung sebesar 0,703 dan pada kolom signifikasi diperoleh probabilitas sebesar 0,002. Probabilitas menunjukkan nilai $0,002 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pendapatan PNS dengan Tingkat Partisipasi Kerja(TPK) di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 – 2005

3. Hipotesis ketiga

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai r hitung sebesar 0,747, sedangkan untuk nilai signifikansi diperoleh probabilitas sebesar 0,001. karena nilai $p < 0,005$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara biaya pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) di Propinsi D.I Yogyakarta pada tahun 1990 – 2005.

4. Hipotesis keempat

Pengujian hipotesis keempat diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,512. Nilai probabilitas menunjukkan 0,42. Nilai $p < 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara IRR Mahasiswa dengan Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) di Propinsi D.I Yogyakarta pada tahun 1990 – 2005.

B. Keterbatasan

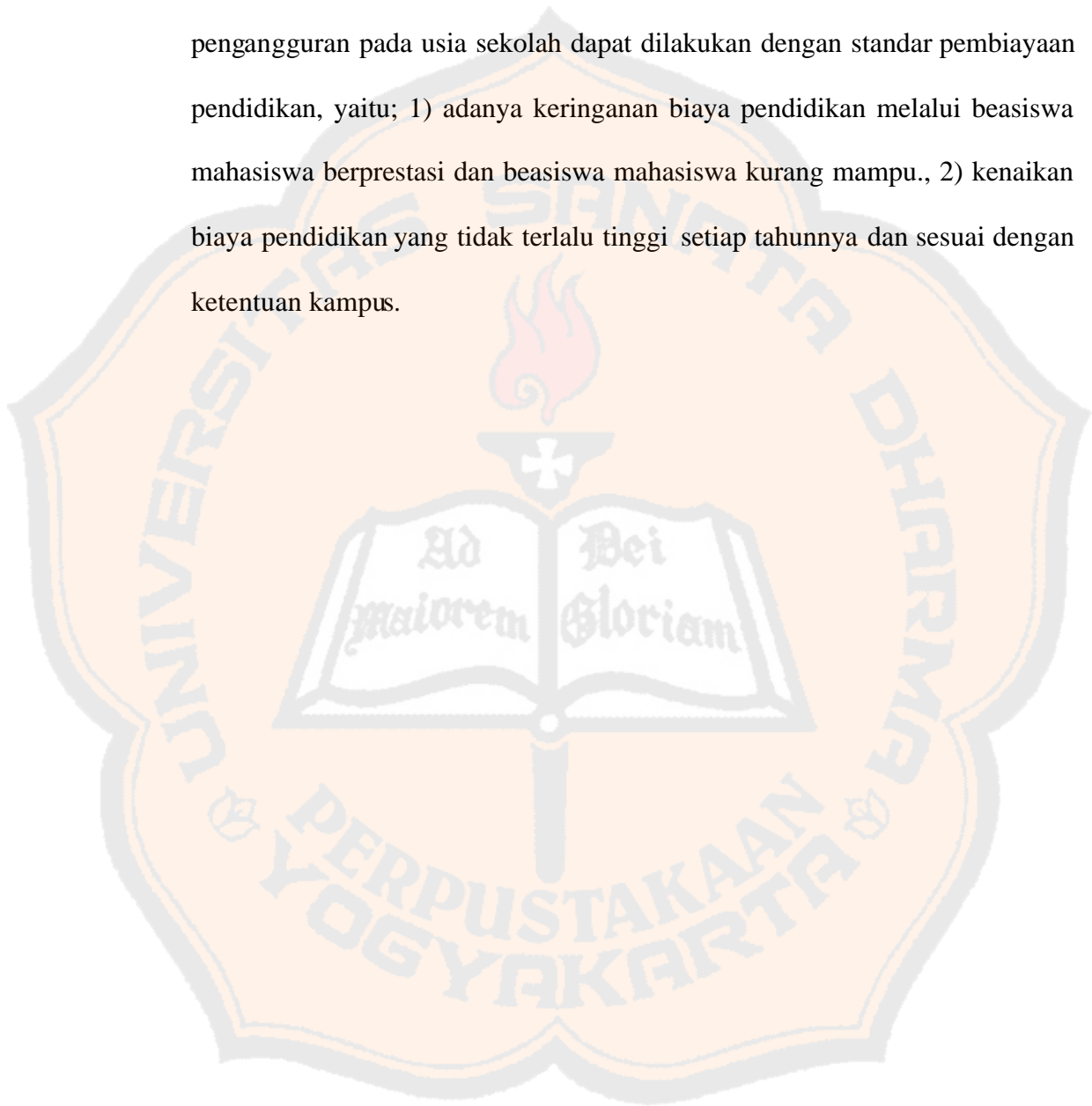
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah mengenai sampel biaya pendidikan. Peneliti mengambil sampel biaya pendidikan dari 8 Universitas di Propinsi D.I Yogyakarta. Tetapi data biaya pendidikan diperoleh dari 6 Universitas, yaitu 2 Universitas Negeri, 3 Universitas Swasta besar, dan 1 Universitas swasta kecil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel biaya pendidikan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini belum mewakili secara keseluruhan biaya pendidikan Perguruan Tinggi di Propinsi D.I Yogyakarta.

C. Saran

Saran dalam penelitian ini berkaitan dalam pengambilan kebijakan ketenagakerjaan di daerah. Adapun kebijakan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Kenaikan UMR harus memperhatikan data-data tentang tingkat pengangguran. Dari pihak penawaran tenaga kerja kenaikan UMR menarik orang untuk bekerja sehingga tingkat partisipasi kerja meningkat. Tetapi dari permintaan tenaga kerja, kenaikan upah menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja tersebut berdampak meningkatnya pengangguran. Untuk menghindari bertambahnya pengangguran yang disebabkan oleh kenaikan upah hendaknya diikuti dengan perluasan lapangan kerja.
2. Kenaikan gaji pokok PNS hendaknya juga memperhatikan data mengenai tingkat pengangguran. Kenaikan gaji pokok PNS dapat memotivasi orang untuk menjadi PNS karena memperoleh penghasilan tetap. Motivasi tersebut menyebabkan TPK untuk menjadi PNS meningkat. TPK yang tinggi akibat kenaikan gaji hendaknya diikuti dengan penyediaan lowongan kerja yang luas. Alasannya untuk menghindari peningkatan pengangguran karena pergantian profesi menjadi PNS yang tinggi.
3. Perlunya peninjauan pelaksanaan standar pembiayaan di Perguruan Tinggi. Peninjauan standar biaya pembiayaan dimaksudkan untuk menghindari biaya pendidikan yang mahal. Apabila biaya mahal menyebabkan anak usia sekolah memilih untuk bekerja tetapi pada kenyataannya lowongan kerja yang tersedia

terbatas. Partisipasi kerja yang tinggi tetapi tidak diikuti penyediaan lapangan kerja yang luas akan berakibat menambah pengangguran. Untuk menghindari pengangguran pada usia sekolah dapat dilakukan dengan standar pembiayaan pendidikan, yaitu; 1) adanya keringanan biaya pendidikan melalui beasiswa mahasiswa berprestasi dan beasiswa mahasiswa kurang mampu., 2) kenaikan biaya pendidikan yang tidak terlalu tinggi setiap tahunnya dan sesuai dengan ketentuan kampus.



DAFTAR PUSTAKA

- Bellante, D dan Mark Jackson. 1983. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Daroesman, Ruth. 1975. *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Badan Penerbit Indonesia Raya.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1978. *Ekonomi Umum 2* Jakarta: Departemen pendidikan dan kebudayaan
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Furchan, Arief. 1982. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional
- Lia, F.S.U 2004. Perbedaan pilihan SMA oleh siswa SMP ditinjau dari Sekolah, prestasi akademik, pendapatan orang tua, persepsi siwa. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma: tidak diterbitkan
- Marsono. 1974. *Pembahasan Undang- undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- pokok kepegawaian*. Jakarta: Ichtiar Baru- van Hoeve
- Prawiroatmojo, Dendasurono. 1988. *Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi di Negara-negara dunia ketiga*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Prawiro, Ruslan. H. 1979. *Kependudukan*. Bandung: Penerbit Alumni
- Razake, Abdul Azis. 1988. *Pengantar Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Simanjuntak, Payaman. 1996. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Siagian. 1984. *Pengembangan Sumberdaya Insani*. Jakarta: Gunung Agung
- Sudijono, Anas. 2001. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Supriadi, Dedi. 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta

Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumarni, M dan S wahyuni. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Wasis, 1984. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Bandung: Penerbit Alumni

<http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/12/nrs.20040612-03.id.html>

<http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/PanduanSimrenas/&view=Bab6A4.pdf> Jumlah angkatan kerja

<http://72.14.235.104/search?q=cache:tVv7NucbdkwJ:pikas.bkkbn.go.id/ditfor/download/data/CukilanData.258%2520doc.doc+%27Tingkat+partisipasi+kerja+di+indonesia%27&hl=id&ct=clnk&cd=31&gl=id> Penduduk, tenaga kerja, Pendidikan dan Kesehatan

http://www.pemda-diy.go.id/berita/mod.php?mod=userpage&page_id=554 Pertumbuhan Ekonomi dan ketenagakerjaan

<http://www.bkkbn.go.id> CukilanData.7Tingkat+partisipasi+kerja+di+jogjakarta Penduduk dan tenaga kerja di Propinsi DIY pdf

http://72.14.235.104/search?q=cache:l3svvCimLF0J:www.apindo.or.id/images/res/Employment_Trends_2007_Ind.pdf+%27Tingkat+Partisipasi+Kerja+di+negara+maju%27&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id. Ketenagakerjaan Global.

<http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/919/934/>. Pertumbuhan Penduduk.

<http://www.depnakertrans.go.id>. Perkembangan Upah Minimum Propinsi

http://www.nakertrans.go.id/tkn/tk_pemuda. php Sumber : Warta Ketenagakerjaan Edisi 11 & 12 (Nopember-Desember) 2004

<http://www.kompas.com>. Barisan Habibi semakin panjang

<http://www.gudegnet>. Profil Propinsi D.I Yogyakarta

<http://students.ukdw.ac.id> Ketenagakerjaan di Propinsi D.I Yogyakarta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<http://72.14.235.104/search?q=cache:phEaqTgEqB0J:digilib.itb.ac.id/gdl.php%3Fmod%3Dbrowse%26op%3Dread%26id%3Dsaptunsrat-gdl-s2-2001-biki2c-1928ekonomi%26q%3DHidup+%27Tingkat+Partisipasi+kerja%27&hl=id&ct=clnk&cd=10&gl=id>. Penelitian terdahulu, judul: PERILAKU EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN PULAU-PULAU KECIL DI WILAYAH KOTA MANADO

<http://72.14.235.104/search?q=cache:r6qMyKgXTxAJ:dspace.fe.unibraw.ac.id/dspace/handle/123456789/569+%27Tingkat+Partisipasi+kerja%27&hl=id&ct=clnk&cd=7&gl=id>. Penelitian terdahulu, judul: ANALISIS VARIABEL- VARIABEL YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA WANITA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

<http://www.bi.go.id> Produk- produk unggulan Propinsi D.I Yogyakarta

<http://www.ugm.ac.id> Profil UGM

<http://www.uny.ac.id> Profil UNY

<http://www.usd.ac.id> Profil USD

<http://www.uajy.ac.id> Profil UAJY

<http://www.uii.ac.id> Proil UII

<http://www.upy.ac.id> Profil Universitas PGRI Yo gyakarta

LAMPIRAN



Lampiran 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		TPAK	UMR	pendtpns	biayapenddkn	IRRMhs
N		16	16	16	16	16
Normal Parameters(a,b)	Mean	67,2000	164015,63	305987,50	4131235,94	5,6363
	Std. Deviation	3,01291	131471,495	284874,636	2773340,899	1,39706
Most Extreme Differences	Absolute	,142	,227	,355	,201	,157
	Positive	,122	,227	,355	,201	,105
	Negative	-,142	-,149	-,190	-,139	-,157
Kolmogorov-Smirnov Z		,569	,908	1,419	,803	,628
Asymp. Sig. (2-tailed)		,902	,381	,036	,540	,826

a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.



Lampiran 2. Korelasi Pearson

Correlations

		TPAK	UMR	pendtpns	biayapenddkn	IRRMhs
TPAK	Pearson	1	,747(**)	,703(**)	,747(**)	,512(*)
	Correlation					
	Sig. (2-tailed)	.	,001	,002	,001	,042
	N	16	16	16	16	16
UMR	Pearson	,747(**)	1	,968(**)	,992(**)	,682(**)
	Correlation					
	Sig. (2-tailed)	,001	.	,000	,000	,004
	N	16	16	16	16	16
pendtpns	Pearson	,703(**)	,968(**)	1	,965(**)	,681(**)
	Correlation					
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	.	,000	,004
	N	16	16	16	16	16
biayapenddkn	Pearson	,747(**)	,992(**)	,965(**)	1	,707(**)
	Correlation					
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	.	,002
	N	16	16	16	16	16
IRRMhs	Pearson	,512(*)	,682(**)	,681(**)	,707(**)	1
	Correlation					
	Sig. (2-tailed)	,042	,004	,004	,002	.
	N	16	16	16	16	16

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 3. Tingkat Partisipasi Kerja
di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 -2005

Tahun	Tingkat Partisipasi Kerja (TPK)
1990	64,90
1991	65,00
1992	65,20
1993	63,30
1994	64,80
1995	60,60
1996	67,90
1997	69,40
1998	67,70
1999	69,61
2000	66,99
2001	67,80
2002	70,17
2003	70,30
2004	71,73
2005	69,80

Sumber: Sakernas BPS Propinsi D.I YOGYAKARTA

Lampiran 4. UMR(Upah Minimum Regional)
Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 -2005

Tahun	UMR(Upah Minimum Regional)
1990	27.000
1991	27.000
1992	37.500
1993	48.000
1994	66.000
1995	85.500
1996	96.000
1997	106.500
1998	122.500
1999	130.000
2000	194.000
2001	237.500
2002	321.750
2003	360.000
2004	365.000
2005	400.000

Sumber: BPS Propinsi D.I Yogyakarta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 5. Pendapatan PNS(Pegawai Negeri Sipil)
di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 -2005

Tahun	Pendapatan PNS
1990	55.500
1991	55.500
1992	86.000
1993	110.100
1994	110.100
1995	110.100
1996	110.100
1997	182.900
1998	182.900
1999	182.900
2000	182.900
2001	620.600
2002	620.600
2003	725.600
2004	725.600
2005	834.400

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Gaji Pokok PNS

Lampiran 6. Biaya Pendidikan
di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 -2005

Tahun	Biaya Pendidikan
1990	1.117.300
1991	1.338.250
1992	1.672.375
1993	1.757.600
1994	2.085.300
1995	2.524.300
1996	2.881.250
1997	2.865.500
1998	3.150.700
1999	3.634.800
2000	4.443.300
2001	5.560.000
2002	6.367.500
2003	8.485.000
2004	8.988.300
2005	9.228.300

Sumber: Hasil rata-rata dari 6 universitas (UGM, UNY, USD, UAJY, UII, UPY)

Lampiran 7. IRR Mahasiswa(Internal Rate Return)
di Propinsi D.I Yogyakarta tahun 1990 -2005

Tahun	IRR Mahasiswa
1990	2,11
1991	4,69
1992	4,14
1993	4,46
1994	6,04
1995	6,20
1996	5,64
1997	5,36
1998	6,32
1999	5,97
2000	4,68
2001	7,27
2002	6,05
2003	6,95
2004	7,90
2005	6,40

Sumber: Susenas BPS Propinsi D.I Yogyakarta

LAMPIRAN 2



LAMPIRAN II

Gambaran Universitas yang menjadi Responden penelitian

Peneliti mengambil 6 Universitas untuk menjadi subyek penelitian, dari subyek penelitian tersebut diperoleh data mengenai biaya pendidikan di enam Universitas. Universitas tersebut terdiri dari Universitas Negeri dan Universitas Swasta. Gambaran mengenai 6 universitas sebagai berikut:

a. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu Universitas tertua di Indonesia dan bersifat nasional. UGM didirikan pada tanggal 19 Desember 1949. Universitas Gadjah Mada berlokasi di kampus Bulaksumur Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada mempunyai 18 Fakultas dan 73 Program Studi. Tahun 2006 jumlah mahasiswa UGM sebanyak 47.000 terdiri atas 63,5% program sarjana, 24% program magister dan doktor, serta 12,5% program diploma (www.ugm.ac.id)

b. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Universitas Negeri Yogyakarta didirikan tanggal 21 Mei 1963. Universitas Negeri Yogyakarta semula bernama IKIP Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud, tanggal 20 Juni 1996 IKIP Yogyakarta berubah menjadi Universitas. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki 6 Fakultas, yaitu: FMIPA, FT, FBS, FIS, FIK. Program Studi sebanyak 37. UNY juga membuka 12 Program Studi non kependidikan. Jenjang Pendidikan di UNY adalah D2, D3, S1, Pascasarjana. Jumlah mahasiswa UNY pada tahun 2004 sebanyak 17.268. Jumlah dosen sebanyak 881 (www.uny.ac.id)

c. Universitas Sanata Dharma (USD)

Universitas Sanata Dharma didirikan pada tanggal 17 Desember 1955. Sanata Dharma diprakarsai oleh Imam-imam katolik Ordo Societas Jesus (SJ). Peter Kester merupakan Imam SJ yang menggabungkan kursus-kursus yang dibuka oleh Imam-imam SJ menjadi PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru). PTPG Sanata Dharma berubah menjadi FKIP pada tahun 1958 dan berubah menjadi IKIP tahun 1965. Berdasarkan SK Mendikbud No 46 / D / O / 1993 IKIP Sanata Dharma berganti menjadi Universitas.

Universitas Sanata Dharma memiliki 8 Fakultas dengan 25 Program Studi, 3 Program Pasca Sarjana, 1 Program profesi, dan 3 Program Kursus Bersertifikat. Jumlah mahasiswa di USD kurang lebih 14.000 mahasiswa(www.usd.ac.id)

d. Universitas Atma Jaya (UAJY)

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam katolik dan dikelola oleh yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta. UAJY didirikan pada tanggal 27 Desember 1965. UAJY memiliki 6 fakultas dengan 11 program studi S-1, dan 5 program S-2, termasuk 4 program studi S-1 kelas internasional. Jumlah mahasiswa UAJY saat ini sebanyak 11.307 orang. Tenaga pendidik di UAJY terdiri dari 7 Guru Besar, 25 Doktor, 222 Master, dan 29 Sarjana(www.uajy.ac.id)

e. Universitas Islam Indonesia (UII)

Universitas Islam Indonesia (UII) didirikan tanggal 8 Juli 1945 dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. STI didirikan sebagai bukti adanya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kesadaran berpendidikan pada masyarakat pribumi. Pada saat Ibu Kota Republik Indonesia berpindah ke Yogyakarta, STI ikut pindah ke Yogyakarta. Pada tanggal 10 April 1946 Presiden Soekarno meresmikan STI dan merubah nama STI menjadi Universitas Islam Indonesia.

Saat ini UII memiliki 5 program jenjang D3, 21 program jenjang S1, 5 program jenjang S2 dan 2 program jenjang S3. UII memiliki jumlah mahasiswa kurang lebih 17.846 orang. Jumlah tenaga pengajar S1 sebanyak 85 orang, S2 sebanyak 250 orang, S3 sebanyak 23 dan professor 3 orang. Letak kampus terpadu UII di Jl. Kaliurang Km 14,4(www.uui.ac.id)

f. Universitas PGRI Yogyakarta (UPY)

Universitas PGRI Yogyakarta terletak di Jl PGRI no 117, Sonosewu, Yogyakarta. Universitas PGRI semula bernama IKIP PGRI. IKIP PGRI berdiri tanggal 11 Desember 1962 dibawah yayasan Pembina Pendidikan PGRI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring dengan perkembangan Jaman pada tanggal 25 Juni 1997 IKIP PGRI berganti nama menjadi Universitas PGRI Yogyakarta (UPY). UPY merupakan institusi di bawah YPLP UPY yang menginduk pada PGRI secara Nasional.

Universitas PGRI Yogyakarta memiliki 9 program studi, yaitu: Teknik Informatika, Akuntansi, Manajemen, Agronomi, Sejarah, Matematika, BK, PPKN, dan Pendidikan Guru SD. Jumlah tenaga pengajar tetap di UPY sebanyak 34 orang . Jumlah mahasiswa UPY sebanyak 1720 orang(www.upy.ac.id)



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

Mrican Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002 Telp. (0274) 513301, 515352, Fax. (0274) 562383

Nomor : 304 / pnt / Kajur / PIPS / X / 2007
Lamp : _____
Hal : Permohonan ijin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala BAPEDA

di tempat

Dengan hormat,
Dengan ini kami memohonkan ijin bagi mahasiswa kami,

Nama : YULIUS KRISTIANTO
No. Mahasiswa : 031324023
Program Studi : PENDIDIKAN EKONOMI
Jurusan : PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Semester : IX (Sembilan)

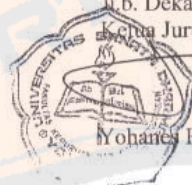
Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan Skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Lokasi : UGM, UNY, Universitas ATMA JAYA, Universitas SANATA DHARMA, UII, UTY, Universitas JANABADRA, Universitas PGRI Yogyakarta
Waktu : 5 OKTOBER – 30 NOVEMBER
Judul : HUBUNGAN ANTARA UMR, PENDAPATAN PNS, BIAYA PENDIDIKAN, IRR MAHASISWA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI KERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (1990 – 2005)

Atas perhatian dan ijin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Oktober, 2007
u.b. Dekan

Ketua Jurusan Pendidikan IPS



Yohanes Harsoyo
Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si

Tebusan :

1.
2. Dekan FKIP



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5712

Membaca Surat : Dekan, FKIP - USD - Yk Nomor : 304/pnt/Kajur/PIPS/XI/2007
Tanggal : 01 Oktober 2007 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 / 2004 tentang
Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : YULIUS KRISTANTO No. Mhs./NIM : 031324023
Alamat Instansi : Mrican Yogyakarta
Judul : HUBUNGAN ANTARA UMR, PENDAPATAN PNS, BIAYA PENDIDIKAN, IRR
MAHASIWA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI KERJA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (1990-2005)

Lokasi : DIY
Waktunya : Mulai tanggal 01 Oktober 2007 s/d 01 Januari 2008

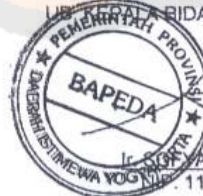
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota)
untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut
di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Rektor UGM Yk;
3. Rektor UNY;
4. Rektor UAJ Yk;
5. Rektor USD Yk;
6. Rektor UII Yk;
7. Rektor UTY;
8. Rektor UJB Yk;
9. Rektor Univ. PGRI Yk;
10. Dekan FKIP - USD Yk;
11. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 Oktober 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
URUS KETATA LINGKUNGAN DAN BIDANG PENGENDALIAN



IC. SYAFYAN AZIZ, CES
110 035 037



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 562011, 588688
Fax. (0274) 565223, E-mail : setr@ugm.ac.id

Nomor : 935/Dir.AA/PD/2007
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

03 DEC 2007

Kepada : Yth. Dekan
u.p. Ketua Jurusan Pendidikan IPS
FKIP Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Menanggapi surat Saudara nomor : 343/pnlt/Kajur/PIPS/XI/2007 tanggal 23 November 2007 perihal permohonan ijin penelitian, pada prinsipnya kami mengijinkan mahasiswa Saudara:

Nama : YULIUS KRISTIANTO
No. Mahasiswa : 031324023
Fakultas : FKIP Universitas Sanata Dharma
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul : "HUBUNGAN ANTARA UMR, PENDAPATAN PNS, BIAYA PENDIDIKAN, IRR MAHASISWA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI KERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (1990 - 2005)"
Lokasi : Direktorat Administrasi Akademik UGM
Waktu : 1 OKTOBER S.D. 1 JANUARI 2008
Anggota Tim : -

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktor Administrasi Akademik

Dr. Ir. Budi Prasetyo Widyobroto, DESS., DEA.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500; Rektor Telp. (0274) 512192

PR I Telp./Fax. : (0274) 561634; PR II Telp./Fax. : (0274) 512851; PR III Telp. : (0274) 548205

E-mail : kerjasama@yogya.wasantara.net.id Home Page : <http://www.uny.ac.id>

Nomor : 399/H34/PL/2007

28 Nopember 2007

Lamp. : -

Hal : Ijin Penelitian -


Yth. Dekan Ekonomi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta

Dengan hormat, menjawab surat Bapak No.343/pnlt/Kajur/PIPS/XI/2007 tanggal 23 November 2007, kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Universitas Negeri Yogyakarta mengijinkan mahasiswa a.n. :

Nama : Yulius Kristianto
No. Mahasiswa : 031324023
Prodi : Pendidikan Ekonomi
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Semester : IX Sembilan

Untuk mengadakan kegiatan penelitian dengan judul " Hubungan Antara UMR, Pendapatan PNS, Biaya, IRR Mahasiswa Dengan Tingkat Partisipasi Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta (1990 – 2005) "

Demikian surat ijin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebaik-baiknya, setelah selesai diharap menyerahkan 1 eksemplar laporan penelitiannya. Kepada yang berkepentingan kiranya maklum dan berkenan memberikan bantuan seperlunya.

Rektor

Prof. Sugeng M. Ardiyono, Ph.D.
NIP 130.687.369

Tembusan Yth. :
- Yang bersangkutan



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Biro Administrasi Umum

Nomor : 541/In/BAU
Hal : Pemberitahuan

15 Nopember 2007

Kepada
Yth. Sdr. Yulius Kristianto
Program Studi Ekonomi (NIM 031324023)
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Dengan hormat,

Memperhatikan surat saudara tanggal, 12 Nopember 2007 tentang permohonan ijin penelitian untuk persiapan penyusunan tugas akhir/skripsi, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan tersebut dapat disetujui, dengan catatan saudara dimohon untuk memberikan laporan hasil penelitian (skripsi) ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Untuk teknis pelaksanaan dapat dikoordinasikan dengan Kepala Bagian Keuangan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Biro Administrasi Umum
Alb. Agus Triyogo, SP

Tembusan, Yth :
- Kabag. Keuangan



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Kotak Pos 1123 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

Nomor : C.537/UPY/XI/2007
Lamp. : -
Hal : Ijin penelitian

Yogyakarta, 6 Nopember 2007

Kepada

Yth. : Bapak Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
u.b. Kepala Bidang Pengendalian
di Yogyakarta

Dengan hormat memperhatikan surat dari BAPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/5712 tanggal 01 Oktober 2007 perihal seperti tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mengijinkan Sdr. YULIUS KRISTIANTO untuk melaksanakan penelitian di Universitas PGRI Yogyakarta.

Demikian agar menjadikan periksa dan perhatian seperlunya.

Pembantu Rektor
Bid. Akademik & Penj. Mutu



Dr. Salamah, M.Pd
REKTOR NIP. 131657937

Catatan :
Untuk keperluan dimaksud harap menghubungi PD II Fakultas Ekonomi

Tembusan

1. Yth. Rektor Sebagai Laporan
2. Yth. Kepala Biro Administrasi Umum